

# Pemetaan Modal Sosial Masyarakat Pulau



Suparman Abdullah



# **PEMETAAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT PULAU**

# **PEMETAAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT PULAU**

## **Penulis**

Suparman Abdullah

## **Tata Letak dan Desain Sampul**

Muhammad Ihlasul Amal

## **Foto Sampul**

Unsplash (Alfiano Sutianto)

## **Penerbit**

UPT Unhas Press

## **Alamat Penerbit**

Gedung UPT Unhas Press (Depan Fakultas Hukum)

Telepon: 0411-8997706 | HP/WA: +62 8535 3555 569

Kampus Unhas Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan KM  
10 Makassar | unhaspress@gmail.com | unhaspress.com

**Hak Cipta** ©Suparman Abdullah. *All rights reserved.* Hak cipta dilindungi undang-undang.

**Cetakan** | 2020

**ISBN** 978-979-xxx-xxx

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Sulawesi Selatan) dan Anggota APPTI (Ikatan Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

*Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.*

## PENGANTAR

**B**ismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahuwataalah atas segala limpahan dan karunianya sehingga buku ini dapat terealisasi, sebagaimana yang ada di hadapan para pembaca.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan melalui kerja sama dengan salah satu perusahaan industri makanan berbasis coklat PT. Mars Symbioscience Indonesia Makassar dan secara personal Amelia Moore, asisten profesor dari Rhode Island University (URI) Amerika Serikat.

Ide dasar dari buku ini adalah memahami modal sosial sebagai potensi dasar yang dapat berkontribusi sebagai pendekatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial

kemasyarakatan. Modal sosial sebagaimana halnya dengan berbagai modal lainnya memiliki karakteristik menghasilkan nilai tambah dan modal baru. Modal sosial memiliki tiga kekuatan utama sebagai perekat, penyambung dan pembuka akses/jaringan. Kekuatan tersebut menjadi sangat relevan sebagai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Kekuatan modal sosial dapat menghadirkan modal manusia, modal ekonomi, modal fisik infrastruktur, modal lingkungan dan modal budaya.

Hakekat dan substansi modal sosial sebagai potensi sumber daya sosial memiliki beberapa elemen yang melingkupinya antara lain kepercayaan, institusi, nilai dan norma sosial, solidaritas sosial, kebijakan dan kearifan sosial, dan jaringan sosial. Elemen modal sosial yang kuat dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu kondisi masyarakat yang peduli, partisipatif, kolaborasi, demokratis, kesetaraan (*equal*), produktif dan sejahtera. Oleh karena itu pemetaan modal sosial dalam suatu masyarakat merupakan upaya perencanaan yang sangat mendasar untuk suatu kegiatan pemberdayaan.

Masyarakat pulau sebagai entitas yang merepresentasi kehidupan masyarakat maritim, memiliki berbagai potensi dan sumberdaya, apabila dikelola secara maksimal akan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri. Salah satu potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat pulau adalah modal sosial. Modal sosial sebagai sumber daya sosial dan personal merupakan sumber

motivasi, sumber nilai, sarana dan pengharapan masyarakat.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau sumber bacaan untuk memperkaya informasi dan pemahaman kita khususnya terkait dengan konsep modal sosial dan masyarakat pulau. Penulis menyadari dengan sepenuh hati dan pikiran bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap masukan dan kritik para pembaca untuk perbaikan penerbitan buku dan karya ilmiah berikutnya.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Amelia Moore sebagai teman diskusi dalam memperkuat konsep dan metode penelitian, Saipul Rapi sebagai mediator kerjasama untuk pendanaan, Dr. Nuvida RAF,MA, Dr. Sakaria,Msi, Sultan Dji-be,Msi sebagai tim peneliti. Terkhusus kepada tim penerbit yang bersedia meyakinkan secara teknis dan substansi akan kelayakan buku ini untuk diterbitkan sebagai suatu karya akademik.

**Salam dari Penulis**

# DAFTAR ISI

PENGANTAR — v

DAFTAR ISI — ix

**1** PENDAHULUAN — 1

**2** ASET KOMUNITAS PULAU BADI — 5

Aset Geografis. — 6

Aset Demografis — 8

Aset Struktur fisik dan infrastruktur — 16

Aset Pelayanan Komunitas (*Community Services*) — 23

Ketersediaan dan Kelengkapan Aset Komunitas	—	27
Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Komunitas	—	32
Masalah dan Ekpektasi Aset Komunitas	—	44

### **3 MODAL SOSIAL KOMUNITAS PULAU — 49**

Kelompok dan Jaringan	—	50
Kepercayaan dan Solidaritas	—	53
Aksi Kolektif dan Kerja Sama	—	55
Informasi dan Komunikasi	—	57
Inklusi dan Kohesi Sosial	—	60
Pemberdayaan dan Tindakan Politik	—	62

### **4 KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN KOMUNITAS PULAU BADI — 65**

Manajemen Kredit	—	66
Konsumsi Sumber Daya/Akses	—	68
Pembuangan Limbah	—	70
Perlindungan Sosial	—	71
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	—	72
Gizi	—	73
Lingkungan dan Persepsi Pendidikan	—	74

### **5 KONDISI RUMAH TANGGA — 79**

Sosial Ekonomi	—	79
Penggunaan Sumber Daya	—	80
Perilaku dan Sikap	—	82

<b>5</b>	<b>KEDEKATAN MARS DAN KOMUNITAS PULAU BADI</b>	<b>— 85</b>
	Kontribusi PT. Mars Sybiocionce Bagi Komunitas	— 85
	Model Intervensi Pengembangan Komunitas PT. MARS	— 87
	Respons Komunitas Terhadap PT. MARS	— 89
	Komitmen Terhadap Pengembangan Masyarakat Pulau	— 91
<b>6</b>	<b>MEMBANGUN HUBUNGAN DAN KEPEMILIKAN BERSAMA KOMUNITAS</b>	<b>— 93</b>
<b>7</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>— 99</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>— 103</b>



# 1 PENDAHULUAN

**P**ulau Badi merupakan salah satu dari dua pulau yang termasuk dalam wilayah desa Mattiro Deceng kecamatan Liukang Tupa'binging kabupaten Pangkep. Penamaan pulau Badi menurut sejarah terdapat tiga versi yaitu versi pertama nama Pulau Badi diambil dari nama jaziratul badi yang berarti pulau yang baik, nama ini diambil dari pendatang Arab yang mensyiarkan agama islam dan menetap di Pulau Badi. Versi yang kedua yaitu nama Pulau Badi diberikan oleh kerajaan Gowa, di mana pada saat raja ingin melihat wi-

layah kekuasaannya, beliau singgah di suatu pulau, saat singgah di pulau tersebut beliau lupa membawa badiknya sehingga pulau tersebut diberi nama Pulau Badi. Versi yang ketiga, dahulu kala Pulau Badi banyak ditumbuhi batang bambu, saat itu ada yang sering memotong pohon bambu untuk membuat keranjang ikan, saat dia memotong bambu badiknya patah sampai dengan tiga kali, sehingga pulau tersebut diberi nama Pulau Badi (sumber: RPJM-Des)

Luas pulau Badi kurang lebih 6,50 ha yang dihuni oleh 402 Kepala keluarga (KK). Komunitas pulau Badi umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan *purseine (gae)* 343 orang, pancing ikan kerapu 106 orang, pancing ikan cumi-cumi 66 orang papuka 8 orang, bubu tindis dan bubu hanyut 12 orang pedagang pengumpul sebanyak 275 orang (kompasiana, 25 Juni 2015). Komunitas pulau badi dihuni oleh dua etnis besar di Sulawesi Selatan yaitu Bugis dan Makassar dengan status sosial yang hampir sama.

Pulau Badi sebagai bagian dari wilayah Desa Mattiro Deceng memiliki dua dusun yaitu dusun Utara dan dusun Selatan. Desa ini berbatasan dengan desa Mattiro Bone di sebelah Utaranya, Desa Mattiro Langi di sebelah Baratnya, Kelurahan Barrang Lompo di Sebelah Selatannya dan perairan Makassar di sebelah Timurnya.

Untuk mengunjungi pulau Badi dapat ditempuh melalui pelabuhan Maccini Baji Labbakkang Pangkep, Sungai Pangkajene, dan pelabuhan paotere Makassar. Jarak tempuh me-

nuju ke pulau Badi dicapai dalam waktu antara 1 sampai 2 jam dengan menggunakan perahu tradisional (*jolloro*). Berbagai program dan lembaga yang pernah dan sedang berjalan adalah *Mars Symbioscience* melalui Ekonatural, Jaringan Ekowisata Bahari (JEB) PNPM-Pedesaan, COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*), Unhas (Universitas Hasanuddin). Semua program dan lembaga yang ada tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas pulau Badi. Bahkan pulau Badi telah dikunjungi oleh beberapa tamu penting antara lain Edward H. (Direktur Peneliti dari Belanda), Roland R. (Antropolog), Maria dan Jim (supervisi bank Dunia) Julia Buntingi (Universitas Duke), Arianto (*Mercy Corps* Jakarta bekerja sama dengan PT. Mars), Mita Novesia, Aswantini dan Merina Ayumi (LIPI Jakarta), Suen dan Noel (Peneliti Budidaya PT.Mars, Amerika Serikat).

Berbagai potensi yang dimiliki oleh pulau Badi antara lain potensi pengembangan wisata bahari, pusat pengembangan penelitian dan pelatihan terumbu karang, pengembangan wisata untuk edukasi, *outdoor recreation*, *diving course and traveling*, *education sea training*, *outbound and water sport*, dan wisata kuliner *seafood*. Beberapa jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi dapat dengan mudah diperoleh di pulau Badi ini seperti baronang (*siganus sp*), katamba (*lethirunus erythropterus*), sunu (*ephineperus sp*) ekor kuning (*casio teres*), katombo (*dekapterus tabi*) dan cumi-cumi.



## 2 ASET KOMUNITAS PULAU BADI

Pada bagian ini, secara khusus dibahas aset komunitas Pulau Badi pada aspek geografis, demografis, fisik lingkungan, sarana dan prasarana masyarakat (*community services*), dan infrastruktur pulau. Aset ini dibahas satu persatu berdasarkan potensi, pengelolaan dan pemanfaatan, masalah dan harapan komunitas Pulau Badi atas berbagai potensi aset tersebut. Aspek-aspek lain terutama potensi ekonomi dan modal sosial (organisasional

dan institusional) di bahas secara spesifik pada bagian berikutnya.

### **Aset Geografis.**

Pulau Badi adalah salah pulau diantara gugusan pulau-pulau yang ada di Selat Makassar. Pulau ini secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Pangkajenne Kepulauan, satu diantara 117 pulau yang ada di Wilayah Kabupaten Pangkajenne Kepulauan, dan satu diantara 80 Pulau yang berpenghuni dalam wilayah Kabupaten Pangkajenne Kepulauan. Pulau ini berada dalam wilayah Desa Mattoro Deceng yang terdiri dari dua Pulau yaitu Palau Pajjenekang dan Pulau Badi, Kecamatan Liukang Tupabbirng.

Secara geogografis Pulau ini terletak di Selat Makassar dengan posisi kurang lebih  $04^{\circ}56'11.9''-04^{\circ}57'07.5''$  LS dan  $119^{\circ}20'02.4''-119^{\circ}21'06.0''$  BT, kira-kira 21 km sebelah utara Kota Makassar dan 32 km sebelah Barat Kota Pangkajenne Pangkep. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan pulau Bonetammu dan Pulau Barrang Lompo, sebelah barat Pulau Lumu-Lumu. Sementara bagian Barat dan Utara berbatasan dengan pulau Pajjenekang, Pulau Sanane, dan Pulau Sarappo Lompo dan Pulau Bonto Sua.

1. Sebelah Selatan: Pulau Gusung Bonetammu dan Pulau Barrang Lompo, Makassar
2. Sebelah Barat: Pulau Lumu-Lumu, Makassar
3. Sebelah Timur: Pulau Pajjenekang dan P. Sanane, Pangkep

4. Sebelah Utara: Pulau. Sarappo Lompo dan Pulau. Bonto Sua, Pangkep

Pulau ini memiliki ketinggian 0-2 m dari permukaan laut dengan luas kurang lebih 6,5 Ha (65.000 m<sup>2</sup>), dikelilingi langsung oleh laut atau selat Makassar. Suhu udara berada pada kisaran 21°C-31°C atau rata-rata 26,40°C, dengan curah hujan maksimal rata-rata mencapai 666/153 per tahun dengan kelembaban udara yang merata, sementara keadaan angin berada pada kecepatan laut sampai sedang.



**Gambar 1.** Pulau Badi

Sumber: Google Earth, imagery date, 11/1/2014

Posisi atau letak pulau Badi sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya menjadi aset bagi komunitas Pulau Badi, terutama karena Pulau ini berada di selat Makassar yang memungkinkan penduduk bisa menikmati atau memanfaatkan sumber daya laut yang ada di sekitar Pulau, di

samping itu posisi seperti ini memungkinkan penduduk Pulau Badi memiliki mobilitas antar pulau yang lebih terbuka, baik antar pulau dalam wilayah Kabupaten Pangkep, maupun antar pulau di luar Wilayah Kabupaten Pangkep, terutama Pulau-Pulau yang berada dalam Wilayah Kota Makassar, seperti Pulau Lumu-Lumu, Barang Lompo, dan Barangcaddi. Lebih jauh Penduduk Pulau Badi memiliki akses yang lebih terbuka ke Kota Makassar jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain dalam wilayah Kab. Pangkep, hanya memiliki jarak kurang lebih 21 Km dari Kota Makassar dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam menggunakan *speed baot*, atau 2 jam menggunakan perahu tradisional bermotor.

## **Aset Demografis**

Aset demografi merupakan aset yang sangat vital bagi suatu komunitas. Aset Demografi menunjuk pada sumber daya manusia berdasarkan sejumlah kategori fisik dan sosial, seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama dan kategori sosial lainnya. Dari sisi demografis ini, aset yang sangat penting diperhatikan pada komunitas Pulau Badi adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, di samping aspek demografis lainnya.

Jumlah penduduk Pulau Badi sekitar 1871 Jiwa, yang terdiri dari 904 laki-laki dan 967 perempuan, dengan jumlah KK 460 (Sumber, RPJM Desa Mattiro Deceng 2011-2016). Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebagaimana hasil survei household terhadap 50 KK sebanyak 5 anggota keluarga.

Jumlah ini cukup ideal bagi satu keluarga, yang terdiri dari keluarga inti ayah, ibu dan anak. Jika jumlah anggota keluarga ini dikaitkan dengan beban ekonomi keluarga, maka jumlah ini tidak terlalu membebani keluarga secara ekonomi. Artinya kepala keluarga yang bertindak sebagai penanggung jawab ekonomi dalam keluarga inti masih bisa menanggung secara ekonomi anggota keluarga lainnya, sungguhpun masih serba kekurangan. Beban ekonomi ini akan semakin ringan jika anggota keluarga lainnya juga memiliki mata pencaharian sendiri. Berdasarkan hasil Survei mayoritas pendapatan KK berada di bawah Rp3.000.000 per bulan dengan pekerjaan utama nelayan. Jumlah pendapatan ini masih kurang jika dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas kebutuhan keluarga komunitas Pulau Badi, terutama kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan, apalagi pemenuhan kebutuhan sekunder lainnya.

**Tabel 1.1** Distribusi Responden Menurut Jumlah Anggota Keluarga

No	Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase
1	1 sampai 3 orang	12	24.0
2	4 sampai 6 orang	26	42.0
3	7 sampai 9 orang	10	20.0
4	10 orang ke atas	2	4.0
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Hasil Survei Household 2016

Tingkat pendidikan Komunitas Pulau Badi mayoritas masih SD. Berdasarkan hasil survei terhadap 50 KK di Pulau Badi 94 % berpendidikan tamat SD, selebihnya Tidak tamat SD

dan SMA. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Pulau Badi dari sisi pendidikan masih tergolong rendah, jauh dari pemenuhan sembilan tahun wajib belajar. Rendahnya pencapaian pendidikan ini terutama karena akses pendidikan yang lebih tinggi cukup sulit bagi warga Komunitas Pulau Badi. Untuk melanjutkan pendidikan SMA atau pendidikan tinggi harus keluar dari Pulau Badi, terutama di Ibu Kota Kecamatan, atau ke Kota Pangkajenne dan Kota Makassar. Di samping karena alasan aksesibilitas pelayanan pendidikan, bisa diduga karena sikap dan perilaku komunitas Pulau Badi terhadap pendidikan yang lebih tinggi juga masih rendah. Anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak dibutuhkan untuk penduduk yang bekerja sebagai nelayan, cukup pendidikan dan keterampilan sederhana saja sebagai nelayan adalah satu nilai yang lama berkembang dalam masyarakat, termasuk komunitas nelayan. Walaupun hasil survei menunjukkan bahwa sikap responden terhadap pendidikan sekarang ini sangat penting, tapi kenyataannya rata-rata tingkat pendidikan anggota keluarga masih SD.

**Tabel 1.2.** Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Tamat SD	1	2.0
2	Tamat SD	47	94.0
3	SMA	2	4.0
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data primer Hasil Survei

Mata Pencaharian dan pendapatan. Sebagai komunitas pulau maka mayoritas mata pencaharian penduduk Pulau Badi bergerak di bidang perikanan, terutama sebagai nelayan tangkap. Berdasarkan data dalam RPJM desa Mattiro Deceng 2011-2016, penduduk Pulau Badi yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 85,7% dari total penduduk yang bekerja sebanyak 680 Jiwa. Besarnya porsi penduduk yang bekerja sebagai nelayan tidak lepas dari aset geografis yang dimiliki oleh komunitas Pulau Badi yang terletak di Selat Makassar yang memungkinkan penduduk Pulau memiliki peluang yang terbuka dan besar terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, mengingat laut beserta segala isinya adalah milik bersama.

**Tabel 1.3.** Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Komunitas Pulau Badi

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Percentase
1	Dagang	38	5.6%
2	Nelayan	583	85.7%
3	Warung	20	2.9%
4	Tukang Kayu	9	1.3%
5	Tukang Batu	3	0.4%
6	Tukang Jahit	12	1.8%
7	Tukang Anyam	12	1.8%
8	Tukang Sulam	3	0.4%
<b>Total</b>		<b>680</b>	<b>100.0%</b>

Sumber: RPJM Desa Mattiro Deceng (Pulau Badi), 2011-2016

Besarnya jumlah penduduk Pulau Badi yang bermata pencaharian sebagai nelayan menunjukkan bahwa aset mata

pencaharian komunitas Pulau Badi sesungguhnya sangat homogen. Hasil survei *household* terhadap 50 rumah tangga menunjukkan jenis pekerjaan penduduk pulau Badi mayoritas berada dalam struktur pekerjaan sebagai nelayan seperti, *pongawa*, sawi, nelayan *pa'gae*, nelayan *pakedo-kedo*, nelayan *pa'sodo*, dan nelayan *parawe*. Pekerjaan lain diluar struktur pekerjaan nelayan, hanya di bidang perdagangan (jualan) dan usaha jasa seperti tukang kayu, tukang batu, dan tukang jahit atau anyam.

**Tabel.1.4. Distribusi** Responden Menurut Jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Nelayan pa'gae	12	24.0
2	Nelayan Pakedo-kedo	13	26.0
3	Ponggawa	2	4.0
4	Sawi	3	6.0
5	Nelayan Pa'sodo	3	6.0
6	Ibu RT	3	6.0
7	Pengusaha/ jualan	9	18.0
8	Nelayan Parawe	3	6.0
9	lain-lain	2	4.0
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data primer hasil Survey household 2016

Jika dilihat jumlah pendapatan komunitas Pulau Badi maka cukup variatif, walaupun jenis pekerjaan mereka homogen sebagai nelayan. Variasi pendapatan nelayan diduga karena jenis pekerjaan dalam struktur mata pencaharian nelayan juga bervariasi. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa

variasi jenis pekerjaan dalam struktur mata pencaharian nelayan mulai dari sawi hingga *pong-gawa*, dari nelayan *Parawe* hingga nelayan *pa'gae*. Variasi pendapatan ini juga sangat tergantung posisi dan status usaha mereka sebagai nelayan. Dalam struktur pekerjaan Patron-klien *pong-gawa-sawi* misalnya, ada perbedaan yang nyata tingkat pendapatan antara *pong-gawa* dan *sawi*. *Pong-gawa* cenderung berpendapatan tinggi dan terus mengalami peningkatan pendapatan, sementara *sawi* cenderung berpendapatan rendah, dan pendapatan mereka cenderung tidak bertambah. Misalnya saja Tuan Ibrahim dan H. Thalib keduanya adalah *pong-gawa* dalam struktur nelayan-patron klien yang berpendapatan lebih Rp50.000.000,- per bulan.

“Tuan Ibrahim, seorang keturunan sayyed, nelayan dengan status sebagai *pong-gawa* dengan pendapatan kurang lebih Rp280.000.000,- sekali melaut. H. Thalib, seorang kepala dusun, adalah *pong-gawa* nelayan *Pakedo-kedo*, dengan jumlah pendapatan rata-rata per bulan Rp. 50.000.000.” (Hasil survei *household* 2016)

“Rauf bekerja sebagai sawi pada *pong-gawa* nelayan dengan pendapatan rata-rata Rp500.000,- per bulan. Liwung dan Sari masing-masing sebagai *sawi* atau buruh nelayan dengan pendapatan kurang lebih Rp2.000.000,- per bulan” (Hasil survei *household* 2016)

Berbeda dengan Tuan Ibrahim dan H. Thalib, Rauf seorang nelayan biasa berstatus *sawi*/buruh nelayan atau buruh *pong-gawa*, memiliki pendapatan rendah hanya Rp500.000

per bulan. Pendapatan sedikit tinggi jika dibandingkan dengan Rauf adalah apa yang dialami oleh Liwung dan Sari. Sungguhpun keduanya berstatus sawi (buruh nelayan) tapi pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan Rauf, masing-masing Rp2000.000/bulan.

Perbedaan Pendapatan ini semakin dipertajam dengan status usaha masing-masing nelayan, di mana status usaha sendiri dengan modal besar serta dibantu sejumlah buruh atau anggota keluarga memiliki pendapatan yang besar pula. Hal ini yang diperlihatkan oleh H. Thalib dan Tuan Ibrahim di mana keduanya memiliki modal besar dengan teknologi penangkapan yang memadai, ditunjang oleh sumber daya (sawi) memungkinkan keduanya bisa berpendapatan lebih besar. Sangat berbeda dengan nelayan-nelayan yang bermodal kecil dengan teknologi penangkapan yang sederhana, dan lebih banyak diusahakan sendiri cenderung memiliki pendapatan yang rendah pula.

**Tabel 1.5.** Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan dan Jumlah Pendapatan per Bulan

No	Jenis pekerjaan	Pendapatan Kepala Keluarga (Rp)					Total
		Di Bawah 1.500.000,-	1.500.000- 3.000.000,-	3.000.000- 4.500.000,-	4.500.000,- 6.000.000,-	Di Atas 6.000.000,-	
1	Nelayan pa'gae	8 61.5%	1 7.7%	3 23.1%	1 7.7%	0 0.0%	13 100.0%

No	Jenis pekerjaan	Pendapatan Kepala Keluarga (Rp)					Total
		Di Bawah 1.500.000,-	1.500.000- 3.000.000,-	3.000.000- 4.500.000,-	4.500.000,- 6.000.000,-	Di Atas 6.000.000,-	
2	Nelayan Pakedo-kedo	7 46.7%	5 33.3%	0 0.0%	2 13.3%	1 6.7%	15 100.0%
3	Ponggawa	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%	2 100.0%
4	Sawi	1 25.0%	3 75.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 100.0%
5	Nelayan Pa'sodo	0 0.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%
6	Ibu RT	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
7	Pengusaha/ jualan	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 50.0%	4 100.0%
8	Nelayan Parawe	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
9	Lain-lain	0 0.0%	1 20.0%	2 40.0%	2 40.0%	0 0.0%	5 100.0%
<b>Total</b>		<b>17</b> <b>34.0%</b>	<b>18</b> <b>36.0%</b>	<b>5</b> <b>10.0%</b>	<b>5</b> <b>10.0%</b>	<b>5</b> <b>10.0%</b>	<b>50</b> <b>100.0%</b>

Sumber: Hasil Survei household 2016

Perbedaan pendapatan antara *Ponggawa* dan *Sawi*/bukan *pongawa* menunjukkan bahwa potensi aset komunitas dalam mata pencaharian di Pulau Badi sesungguhnya sangat tergantung pada posisi dalam struktur nelayan dan status

usaha mereka dalam menjalankan usaha sebagai nelayan. Hal yang sangat mendasar bahwa, mata pencaharian nelayan sesungguhnya memiliki potensi besar untuk memiliki pendapatan tinggi jika nelayan-nelayan di Pulau Badi memiliki kapasitas untuk mengubah posisi mereka dalam struktur nelayan, dan meningkatkan pola dan status usaha mereka dari modal dan sumber daya kecil dan sederhana ke status usaha yang lebih besar dan sumber daya dan teknologi yang lebih modern. Perubahan posisi dan status usaha ini bagi Komunitas Pulau Badi sangat terbuka, tergantung sejauh mana aset komunitas dalam bentuk mata pencaharian ini menjadi “*sense of community*” bagi komunitas Pulau Badi yang harus dikelola, dimanfaatkan dan dibagi secara maksimal bagi kepentingan komunitas Pulau Badi.

Berdasarkan Survei *Household* 2016, hanya ada dua *pongawa* yang terdata atau 6 % dari total KK yang disurvei. Jumlah ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan posisi pekerjaan nelayan lainnya seperti nelayan *pa'gae*, dan nelayan *pe'kedo-kedo*, nelayan *pa'sodo*, nelayan *pa'rawe* dan sawi. Dengan demikian mayoritas pendapatan komunitas Pulau Badi sesungguhnya berada pada jenis pekerjaan nelayan bukan *pongawa* (non *pongawa*), terutama nelayan *pa'gae* dan nelayan *pe'kedo-kedo* (50% dari total responden).

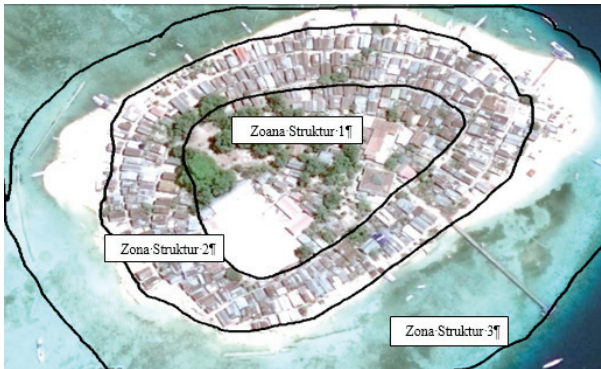
## **Aset Struktur fisik dan infrastruktur**

Struktur Fisik dan infrastruktur Pulau Badi memiliki tipikal yang sama dengan pulau-pulau lain pada umumnya, yang

ditandai dengan struktur pemukiman dan perumahan yang padat mengikuti pola dan bentuk geografis dan topografi pulau. Aset struktur fisik ini bisa dilihat berdasarkan kecenderungan penempatan aset fisik (bangunan), infrastruktur, dan fisik lingkungan dalam suatu pulau atau komunitas.

Secara umum aset struktur fisik dan infrastruktur komunitas Pulau Badi jika dilihat dari lokasi penempatan maka secara umum mengikuti pola lingkaran sesuai bentuk pulau, yang terdiri dari tiga zona aset struktur fisik utama yaitu: Struktur fisik terluar di sepanjang garis pantai merupakan areal terbuka kegiatan nelayan. Wilayah ini merupakan tempat mobilitas dan sandaran perahu bagi komunitas nelayan pada khususnya dan penduduk pulau Badi pada umumnya. Karena itu pada zona struktur ini dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur seperti dermaga/pelabuhan dan sandaran untuk perahu/kapal nelayan, termasuk kapal/perahu untuk transportasi. Di Pulau ini terdapat dua dermaga yaitu dermaga yang terletak di bagian Selatan dan Utara Pulau. Dermaga bagian selatan memiliki panjang kurang lebih 112 meter (dermaga Panjang), sementara dermaga bagian utara hanya kurang lebih 30 Meter (dermaga pendek), dengan lebar kurang lebih 3 meter. Kedua dermaga ini dirancang untuk dermaga perahu atau kapal dengan ukuran yang lebih besar, baik perahu nelayan, perahu motor penumpang, maupun perahu pengangkut barang baik dari pulau lain maupun dari makassar dan wilayah di sekitar Pangkajenne Kepulauan.

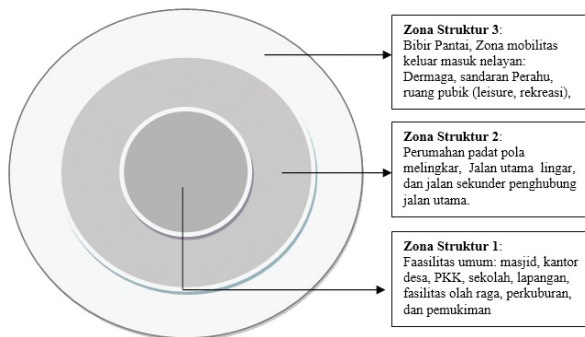
“Ada dua dermaga yaitu dermaga panjang dan dermaga pendek sebagai tempat berlabuh perahu motor penumpang, perahu nelayan dan perahu-perahu motor yang mengangkut bahan bangunan dari Makassar ataupun dari daerah lain seperti dari Galesong Kabupaten Takalar” (Hasil FGD Pemetaan Aset komunitas)



**Gambar 2.** Pola Aset Struktur Fisik Pemukiman Komunitas Pulau Badi  
Sumber: Photo google earth, Observasi, FGD, dan Survei

Infrastruktur lain yang sangat penting adalah jalan dalam pulau, secara umum struktur jalan mengikuti bibir/garis pantai melingkar berdasarkan pola pemukiman yang ada. Berdasarkan data yang ada jalan di Pulau Badi diperkirakan mencapai 4000 m, baik berupa jalan utama maupun jalan (setapak) yang menghubungkan jalan utama. Struktur permukaan jalan utama terbuat dari *paving block* dan sebagian masih pasir (tanah). Lebar rata-rata jalan utama antara 3 sampai dengan 4 meter, sementara jalan penghubung/setapak 1 sampai 3 meter.

Pada wilayah ini hampir semua bibir pantai menjadi lokasi sandaran perahu (parkir perahu). Konstruksi sandaran perahu tidak perlu dibuat secara khusus mengingat garis pantai Pulau Badi landai dan tidak dalam sehingga memungkinkan perahu bisa sandar dengan mudah, cukup dilengkapai dengan jangkar seperlunya di sepanjang bibir pantai yang tidak jauh dari lokasi pemukiman (struktur fisik 2). Wilayah ini juga merupakan wilayah terbuka untuk melakukan aktivitas lain terutama untuk beristirahat dan bercengkerama dengan warga pulau lainnya. Bahkan struktur fisik pertama ini seringkali menjadi areal pembuangan sampah dan limbah/kotoran penduduk. Walaupun struktur aset fisik ini secara fisik berupa dermaga, sandaran perahu dan fisik pantai tapi aset ini bagi komunitas pulau Badi sangat vital mengingat aset ini merupakan pintu gerbang bagi aktivitas nelayan, dan aktifitas penduduk pada umumnya, terutama dalam mengakses pulau-pulau lain dan kota Makassar khususnya.



**Gambar 3.** Pola Konsentrik Aset Struktur Fisik dan Infrastruktur Komunitas Pulau Badi

Struktur pemukiman atau perumahan (struktur 2), dengan pola utama perumahan mengikuti garis atau bibir pantai, kira-kira 10-20 meter dari bibir/permukaan laut/pantai hingga ke pusat atau pertengahan pulau dengan pola utama melingkar (konsentris). Pola lingkaran pemukiman ini ditandai dengan struktur jalan utama yang melingkari pulau pada sisi terluar, kemudian dilanjutkan dengan lingkaran jalan kedua pada sisi dalam, yang terdiri dari dua jalan utama yang melingkar (lihat peta struktur pemukiman). Jalan utama ini masing-masing dihubungkan dengan jalan-jalan sekunder atau lorong.

Struktur fasilitas umum (struktur 1) di tengah-tengah pemukiman misalnya masjid, sekolah, dan lapangan olahraga (alun-alun), fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, taman pemakaman dan fasilitas umum lainnya. Struktur pertama (inti) ini merupakan pusat fasilitas fisik komunitas Pulau Badi. Di lokasi ini ditemukan berbagai fasilitas fisik yang vital terkait dengan kebutuhan dasar seperti Sekolah (SD dan SMP), Puskesmas pembantu dan Posyandu, Lapangan Olahraga, Masjid dan bank sampah. Pada lokasi ini juga terdapat aset komunitas yang sangat penting terkait dengan pelayanan politik dan pemerintahan yaitu kantor pemerintahan desa Mattiro Deceng. Keberadaan kantor desa di Pulau ini menjadi aset yang sangat penting mengingat Desa Mattiro Deceng sesungguhnya terdiri dari pulau yaitu pulau Pajennekang dan pulau Badi, dan Pulau Badi menjadi tempat kantor pemerintahan desa. Keberadaan kantor desa di Pulau Badi secara fisik juga membawa perangkat-perangkat lainnya yang melekat

pada kantor desa yaitu kantor BPD (Badan Perwakilan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

**Tabel 1.6.** Daftar Aset Fisik Fasilitas Umum dan infrastruktur Komunitas Pulau Badi

No	Fasilitas Umum	Jumlah	Letak Zona
1	SD	2	Aset Struktur Fisik 3
2	SMP	1	Aset Struktur Fisik 3
3	Posyandu		Aset Struktur Fisik 3
4	Puskesmas Pembantu	1	Aset Struktur Fisik 3
5	Dermaga	2	Aset Struktur Fisik 1
6	Masjid	1	Aset Struktur Fisik 3
7	PLN genset (sumber Listrik)	1	Aset Struktur Fisik 3
8	Sumber air bersih		Aset Struktur Fisik 2 dan 3
9	Jalan	+ 4000 m	Aset Struktur Fisik 2 dan 3
10	Pemukaman	1	Aset Struktur Fisik 3
11	Bank sampah	1	Aset Struktur Fisik 3
12	Lapangan Olah raga	1 (lapangan bola)	Aset Struktur Fisik 3
13	Kios/Warung		Aset Struktur Fisik 2 dan 3
14	Transportasi Umum (perahu motor)	2	Aset Struktur Fisik 1
15	Tanggul	1 Unit (100 m)	Aset Struktur Fisik 1
16	MCK	3 Unit	Aset Struktur Fisik 2 dan 3
17	Kantor Pemerintahan Desa (LPM, PKK, BPD)	1	Aset Struktur Fisik 3

Sumber: FGD, Survey dan RPJM Desa Mattiro Deceng

Ketiga aset struktur fisik dan infrastruktur di atas sesungguhnya saling menyatu sebagai aset komunitas Pulau Badi. Pembagian ketiga aset struktur fisik tersebut sesungguhnya untuk memudahkan melihat kecenderungan penempatan aset fisik bangunan, infrastruktur dan fisik lingkungan. Lebih jauh dengan pola penempatan aset struktur seperti di atas menunjukkan adanya keseimbangan aksesibilitas fisik dan mobilitas warga pulau Badi baik dalam pulau maupun di luar Pulau. Keseimbangan aksesibilitas bisa dilihat dengan pola perumahan dan infrastruktur yang memungkinkan semua warga bisa saling berinteraksi, dan pola penempatan fasilitas fisik kebutuhan dasar yang berada di tengah-tengah komunitas pulau yang memungkinkan setiap warga dengan mudah bisa mengakses fasilitas fisik tersebut.

Satu hal yang sangat mendasar bahwa Pulau Badi adalah pulau Kecil (luas 6,5 Ha) yang dihuni oleh lebih dari 460 KK, dengan tingkat kepadatan penduduk dan pemukiman cukup tinggi, sehingga memungkinkan kesadaran ruang dan komunitas (*sense of place dan sence of belonging*) komunitas pulau Badi juga tinggi.

“Kalau di sini di Pulau Badi hanya satu lingkungan/dusun yang terdiri dari beberapa rumah tangga dan hampir semua warga di sini saling mengenal dan saling mengetahui letak dan posisi rumah warga yang lain dan beberapa rumah tangga terdiri dari beberapa kepala keluarga yang tinggal di dalamnya” (Hasil FGD)

## **Aset Pelayanan Komunitas (*Community Services*)**

Seperti diuraikan sebelumnya, komunitas Pulau Badi memiliki sejumlah aset struktur fisik, infrastruktur dan fisik lingkungan. Aset fisik yang terkait dengan pelayanan masyarakat mencakup beberapa fasilitas seperti sekolah, Puskesmas dan Posyandu, kantor desa, PLN Jenseh, transportasi dan fasilitas fisik lainnya. Berikut beberapa aset pelayanan komunitas yang terkait dengan ketersediaan aset fisik bangunan pelayanan yang ada di Pulau Badi.

Pelayanan Pendidikan. Pelayanan pendidikan di pulau Badi secara formal masih terbatas pada pendidikan dasar, terutama SD (sekolah Dasar) dan SMP (sekolah Menengah Pertama). Di Pulau ini terdapat dua SD masing-masing SD Neg 9 dan SD Neg 27 Mattiro Deceng. Kedua SD ini melayani kebutuhan pendidikan dasar usia 6 sampai dengan 12 tahun. Disamping kedua SD tersebut terdapat juga pelayanan pendidikan dasar untuk tingkat lanjutan berupa SMP/SLTP (Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Sekolah ini memberikan pelayanan pendidikan tingkat lanjutan terutama usia sekolah yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SD. Dengan tersedianya dua tingkatan pelayanan Pendidikan formal ini, maka Komunitas Pulau Badi sudah bisa menikmati dan memenuhi program wajib belajar sembilan tahun.

Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan di Pulau Badi ditandai dengan penempatan Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) Pembantu. Puskesmas pembantu ini merupakan unit pelayan kesehatan yang sederhana dan berfungsi untuk menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam lingkup wilayah Pulau Badi sesuai kemampuan dan tenaga yang dimiliki. Pelayanan Pustu di Pulau Badi lebih banyak dilakukan oleh tenaga bidan. Kondisi fisik bangunan PUST tergolong baik belum mengalami kerusakan.

Pelayanan Politik dan pemerintahan. Pelayanan politik dan pemerintahan, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar dan administratif sebagai warga negara ditunjukkan dengan adanya fasilitas kantor Pemerintahan Desa di Pulau Badi. Keberadaan kantor desa ini memungkinkan warga Pulau Badi lebih mudah menyampaikan aspirasi dan menyalurkan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama hak-hak dasar mereka untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan dalam bentuk KTP dan KK, di samping hak-hak lain dalam pelayanan pemerintahan.

Keberadaan Kantor Desa ini juga memudahkan warga Pulau Badi menyalurkan aspirasi-pendapat, saran, dan kritik terhadap berbagai perencanaan dan kebijakan pembangunan di tingkat desa (Pulau Badi), bahkan di tingkat yang lebih besar seperti kecamatan dan kabupaten. Potensi penyaluran aspirasi ini dimungkinkan bukan karena kemudahan akses fisik saja, tapi pemerintahan desa disertai dengan perangkat-perangkat institusi seperti BPD (Badan Perwakilan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan PKK (Pem-

berdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang memungkinkan warga desa menjadi subjek atau pelaku utama di setiap instansi pemerintahan desa tersebut. BPD misalnya adalah badan perwakilan desa di mana anggota-anggotanya dipilih oleh, dari dan untuk masyarakat melalui pemilihan secara partisipatif. Ini berarti bahwa masyarakat dalam beberapa hal memiliki peluang secara politik untuk dipilih dan memilih, dan secara langsung telah menyalurkan aspirasi mereka. Lebih dari itu BPD adalah perangkat desa yang melakukan proses perencanaan pembangunan di Tingkat desa melalui proses partisipatif, yang melibatkan warga.

Pelayanan Penerangan dan Air bersih. Penerangan (listrik) dan air bersih adalah kebutuhan dasar dan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini. Bagi warga komunitas Pulau Badi dua pelayanan ini jauh dari maksimal, sungguhpun keduanya masih bisa dinikmati oleh komunitas Pulau Badi. Pelayanan listrik yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini PLN terbatas pada penyediaan Genset dengan sistem layanan hanya pada waktu malam hari saja.

“Sumber penerangan/listrik menggunakan genset PLN yang nyala mulai jam 5 atau 6 sore sampai jam 6 pagi, ada juga warga yang menggunakan tenaga surya sebagai sumber alternatif listrik” (Hasil FGD Pemetaan AsetUmur 20-40 tahun).

Bagi komunitas pulau Badi layanan penerangan listrik ini jauh dari kebutuhan, menurut mereka kebutuhan listrik bukan hanya pada malam hari tapi juga pada siang hari.

Sumber air di Pulau Badi mengandalkan mata air atau resapan air tanah yang didapat melalui penggalian sumur, tapi air yang diperoleh dari sumur ini tidak bisa dikonsumsi, hanya bisa untuk mandi dan cuci saja. Berikut hasil FGD tentang sumber pelayanan air bersih.

“Sumber air masyarakat, masing-masing punya sumur dan pada saat musim kemarau sebagian masyarakat membeli air yang dijual dari Makassar dengan harga Rp5000/jerigen untuk mencukupi kebutuhan air minum dan masak kemudian pada musim hujan masyarakat menampung air hujan untuk persediaan jika terjadi kekurangan air selain itu di Pulau Badi sudah ada juga usaha air isi ulang/galon dengan harga Rp. 5000/galon” (Hasil FGD perempuan kelompok umur 20 tahun)

“Warga pulau ini sangat kesulitan untuk pemenuhan air bersih, karena untuk memenuhi hal tersebut mereka harus ke Makassar terutama pada musim kemarau, tapi kalau musim hujan mereka dapat memanfaatkan tadah air hujan sebagai kebutuhan air bersih”. (hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat)

Hasil FGD di atas menunjukkan bahwa pelayanan air bersih pada komunitas pulau Badi dilakukan secara mandiri melalui proses alamiah (sumur dan tadah hujan) dan membeli langsung ke penjual air bersih baik di Pulau Badi sendiri atau langsung beli di Makassar. Layanan Air bersih ini jauh dari pelayanan air bersih, yang seharusnya disiapkan oleh negara/pemerintah.

Di pulau Badi sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat pernah ada teknologi pengelolaan

air bersih yang langsung dapat diminum yang difasilitasi oleh Pemerintah, tapi pelayanan ini tidak berlangsung lama hanya kurang lebih dua tahun karena peralatannya rusak dan masyarakat tidak mampu memperbaikinya karena peralatan atau teknologi yang dipakai terlalu mahal harganya, sementara dana yang terkumpul melalui sisa hasil pembelian air minum kurang. Lebih jauh menurut tokoh masyarakat terputusnya layanan air bersih ini karena buruknya pengelolaan.

“Kurangnya dana terkumpul karena buruknya pengelolaan, bahkan para pengurus saling lempar tanggung jawab sampai menimbulkan sikap saling curiga yang berujung pada buruknya harmoni sosial di kalangan warga” (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat).

### **Ketersediaan dan Kelengkapan Aset Komunitas**

Ketersediaan dan kelengkapan aset komunitas merupakan hal yang mendasar bagi komunitas pulau-pulau kecil, termasuk pulau Badi. Ketersediaan dan kelengkapan aset ini terkait dengan kuantitas dan kualitas aset komunitas pulau, terutama yang terkait dengan aset demografi, fisik infrastruktur dan pelayanan masyarakat (*community services*).

Sebagai Pulau kecil maka secara geografis komunitas pulau Badi mengandalkan potensi laut sebagai aset utama mereka. Sistem hidup dan kehidupan (*livelihood*) komunitas pulau Badi sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitarnya terutama laut. Komunitas seperti ini biasa disebut sebagai komunitas pulau atau komunitas nelayan (*fishery commu-*

nity, *island community*), karena aktivitas kehidupan mereka lebih banyak mengandalkan kegiatan nelayan. Aset geografis komunitas pulau sesungguhnya tidak lain adalah laut dengan segala isinya, terutama potensi perikananannya. Sebagai aset maka sesungguhnya aset komunitas pulau sangat melimpah. Namun demikian aset ini tidak akan bermakna buat komunitas pulau jika tidak didukung dengan aset komunitas lain seperti aset demografi, fisik infrastruktur dan pelayanan masyarakat, termasuk aset yang bersifat institusional (*social capital*).

Secara demografis komunitas pulau Badi memiliki aset yang cukup jika dilihat dari sisi jumlah, tapi jika aset ini dilihat dari komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, maka ada kecenderungan aset demografi pulau Badi dari sisi kuantitas dan kualitas agak rendah (minim). Tingkat pendidikan misalnya sebagaimana diuraikan sebelumnya komunitas Pulau Badi masih mayoritas SD, jauh dari pemenuhan program wajib 9 tahun, apalagi mencapai Pendidikan Tinggi. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SMA, apalagi Perguruan Tinggi masih rendah. Rendahnya pencapaian tingkat pendidikan ini terkait dengan minimnya ketersediaan pelayanan pendidikan dan rendahnya aksesibilitas pelayanan pendidikan di Pulau Badi.

Dari sisi ketersediaan fisik bangunan dan pelayanan sekolah, baru SD dan SMP yang tersedia di Pulau Badi. Sekolah ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai terutama sumber daya guru. Berdasar-

kan survei terhadap 50 KK, hanya 18% responden mengatakan bahwa ketersediaan guru sudah cukup, sisanya sebesar 82% mengatakan tidak cukup bahkan sangat tidak cukup.

**Tabel 1.7.** Distribusi Pendapat Responden terhadap Ketersediaan Guru

No	Kondisi	Frekuensi	Persentase
1	Sangat tidak cukup	10	20.0
2	Tidak cukup	31	62.0
3	Cukup	9	18.0
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Hasil Survei Rumah Tangga (Household Survey)

Kondisi seperti ini juga terjadi pada aset pelayanan kesehatan, walaupun dalam beberapa hal menurut tokoh masyarakat pelayanan kesehatan sudah cukup memadai. Keberadaan Puskesmas pembantu dan Posyandu bagi masyarakat cukup memberikan pelayanan bagi warga yang mengalami sakit ringan, yang bisa diatasi berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan Puskesmas Pembantu. Sebagai Puskesmas Pembantu, maka pelayanannya sangat sederhana tergantung Puskesmas Induk. Sumber daya yang tersedia terutama tenaga kesehatan juga tidak maksimal, termasuk ketersediaan obat-obatan. Minimnya ketersediaan dan kelengkapan pelayanan kesehatan ini dirasakan betul oleh masyarakat, terutama jika ada warga yang mengalami sakit serius. Biasanya Pustu tidak bisa melayani secara maksimal, dan kalau ini terjadi biasanya warga dengan terpaksa harus ke Makassar berobat atau mencari obat yang sesuai.

“ Pelayanan kesehatan dari petugas medis di pulau ini sudah memadai tapi masih perlu ditingkatkan fasilitasnya sampai pada tahap puskesmas supaya masyarakat tidak perlu terlalu jauh untuk berobat jika kena penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter atau bidan yang bertugas di pulau ini” (Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat 2016)

Demikian halnya dengan aset fisik dan pelayanan komunitas lainnya seperti pelayanan air bersih, pelayanan penerangan listrik dan pelayanan transportasi. Pulau ini belum menikmati ketiga pelayanan itu secara maksimal. Air bersih khususnya untuk kebutuhan minum dan makan, harus diupayakan secara mandiri dengan cara membeli dari penjual air, baik penjual air galon yang ada di Pulau Badi, atau membeli langsung dari Makassar.

“Kebutuhan air minum juga sebagian didatangkan dari Makassar kecuali pada musim hujan karena umumnya warga memanfaatkan air hujan yang telah ditampung sebagai salah satu sumber air minum” (Hasil Wawancara).

Penerangan listrik juga masih kurang, sungguhpun sudah ada pelayanan dari PLN berupa penyediaan mesin Genset, tapi genset ini hanya untuk kebutuhan penerangan malam, mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Oleh komunitas Pulau Badi Listrik yang disiapkan oleh PLN belum cukup, karena belum bisa melayani pada siang hari. Bahkan ada penduduk yang menggunakan energi listrik tata surya atas biaya dan pengelolaan sendiri.

“Kebutuhan energi listrik sudah terpenuhi melalui tenaga diesel meskipun hanya dinikmati pada malam hari mulai pukul 18.00 sampai pukul 06.00 pagi. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar solar melalui iuran warga yang dibayar setiap bulannya. Keterbatasan sumber energi listrik tersebut juga berpengaruh pada rencana usaha produksi yang akan dilakukan sehingga usaha yang terkait langsung dengan pemanfaatan energi listrik tidak dapat dikembangkan kecuali dengan mengandalkan sumber energi alternatif seperti tenaga surya atau sumber energi lainnya” (Hasil FGD dan Wawancara dengan informan)

Aset komunitas dalam bentuk transportasi juga belum sepenuhnya memadai, terutama alat transportasi antar pulau dan menuju Makassar. Tercatat hanya ada dua perahu yang sering melayani angkutan komunitas Pulau Badi terutama angkutan menuju Kota Makassar dengan jadwal angkutan hanya sekali sehari itupun hanya pada pagi hari saja. Minimnya alat angkutan ini sangat dirasakan oleh warga jika ada kebutuhan mendesak hendak keluar pulau atau ke Kota Makassar, misalnya kalau ada yang sakit berat, dan butuh penanganan khusus. Ibu-ibu peserta FGD mengatakan:

“Kayaknya transportasi jadi masalah, ... iya (peserta lain), karena satu kali sehari *ji*, baru pagi *ji* adanya. Biasanya kita kan lagi sakit... Lagi kepepet, kan susah *mi* masuk orang kalau lewat *mi* dari jam 7... Iya (peserta lain) perahu jadi masalah kalau ada yang gawat darurat mau masuk rumah sakit.. Biasanya pergi *ki kasian* cari perahu, biasanya orang tidak mau. Tengah malam, padahal anak ini butuh sekali pengobatan,

apalagi kalau muntaber biasa anak-anak. Sering ada yang meninggal” (Hasil FGD kelompok perempuan 40 thn).

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketersediaan dan kelengkapan aset komunitas Pulau Badi sesungguhnya belum memadai. Memang ada sejumlah aset komunitas —sebagaimana diuraikan pada potensi aset sebelumnya— tapi aset-aset yang ada jika ditelusuri lebih jauh masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Apalagi aset-aset yang sifatnya mendasar dan utama, seperti aset komunitas dalam bentuk fasilitas dan pelayanan masyarakat. Sejumlah fasilitas dan pelayanan belum sepenuhnya menjangkau komunitas Pulau Badi. Seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, penerangan (listrik), Air bersih, dan seterusnya.

### **Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Komunitas**

Aset komunitas Pulau Badi terdiri dari tiga jenis jika dilihat dari sistem pengelolaan yaitu:

1. Aset komunitas yang dikelola oleh pemerintah;
2. Aset komunitas yang dikelola oleh komunitas sendiri, dan
3. Aset yang dikelola oleh swasta atau pihak ketiga.

Ketiga aset ini, walaupun berbeda dari segi pengelolaan tapi pada prinsipnya semuanya menjadi aset komunitas pulau Badi dan pemanfaatan aset tersebut juga diperuntukkan untuk komunitas Pulau Badi. Karena itu seringkali ketiga aset tersebut melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya secara berkelanjutan.

“Semua warga negara memiliki hak yang sama terhadap fasilitas dan pelayanan masyarakat tanpa kecuali termasuk warga miskin seperti yang banyak di Pulau Badi ini terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun bentuk pelayanan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah...” (Hasil FGD kelompok Umur 20-40 Tahun)

Aset komunitas yang dikelola oleh pemerintah adalah segala bentuk aset fisik maupun pelayanan masyarakat yang dibentuk, dibangun, atau difasilitasi dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Aset ini bisa berupa aset geografis, demografis dan fisik infrastruktur. Bentuk aset komunitas yang paling dasar yang dikelola oleh pemerintah adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga, terutama pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, air bersih, penerangan (listrik), infrastruktur, kebersihan, dan politik pemerintahan.

Secara umum aset-aset komunitas Pulau Badi yang dikelola oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan maksimal, bahkan ada beberapa aset yang belum/tidak disediakan atau difasilitasi oleh Pemerintah, seperti penyediaan air bersih, transportasi (khususnya alat transportasi perahu), dan kebersihan. Aset-aset seperti ini langsung dikelola oleh warga Pulau Badi secara mandiri atau swadaya, dengan segala kekurangan dan kesusahan yang dimiliki.

Air bersih seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini PDAM, tapi malah warga sendiri yang ha-

rus bersusah payah menyediakannya. Bahkan harus beli dari Kota Makassar jika musim kemarau tiba. Walaupun sebelumnya pernah ada sistem peyulingan air yang telah difasilitasi oleh Pemerintah, tapi akhirnya sistem itu tidak berlanjut karena pengelolaannya tidak berjalan maksimal. Alat transportasi juga langsung dikelola oleh warga dan belum bisa melayani warga pulau badi secara maksimal. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya ketersediaan angkutan umum dalam bentuk perahu dirasakan kurang, termasuk sistem pengelolannya.

Pelayanan lain yang sangat penting yang dikelola oleh pemerintah adalah pelayanan pendidikan. Di Pulau Badi terdapat tiga sekolah dua SD dan satu SMP, tapi sangat disayangkan pengelolaan dan pemanfaatan aset pelayanan jauh dari standar pelayanan dan harapan masyarakat, bahkan pengelolannya cenderung memprihatinkan.

“Pendidikan di pulau ini sangat memprihatinkan karena sangat tidak berkualitas, masa anak2 sudah duduk di kelas 5 SD masih belum tau membaca, padahal kita dulu baru kelas dua sudah tau membaca ...”(Hasil wawancara dengan kelompok nelayan).

Menurut informan pengelolaan pelayanan pendidikan SD dan SMP di Pulau Badi sangat buruk terutama pengelolaan waktu pembelajaran dan sumber daya manusia (guru). Permasalahan ini sering dikeluhkan dan sering diperbincangkan warga pulau karena dalam satu minggu sering sekali hanya tiga kali seminggu belajar tergantung kehadiran guru. Guru yang telah ditugaskan tidak tinggal di Pulau/tinggal di

Luar Pulau Badi sehingga sangat susah datang sekolah secara rutin.

“Hampir setiap hari sekolah anak-anak kita justru hanya bermain di lapangan dengan tetap memakai pakaian seragamnya” (Hasil FGD kelompok ibu-ibu)

“ Gurunya jarang masuk kelas karena lebih banyak di luar pulau, alasannya mereka lagi kuliah di Makassar, tapi hal itu sudah lama berlangsung, masa kuliah terlalu lama” (Hasil wawancara dengan kelompok nelayan).

“ Gurunya tinggal di Makassar, dan Pangkep. Untuk guru disediakan tempat tinggal Ada juga yang orang pulau tapi jarang masuk karena masih kuliah. Baik SMP maupun SD, sama-sama jarang masuk sekolah karena gurunya jarang datang. SD masuk paling 2x sepekan” (Hasil FGD Kelompok pemuda)

Aset-aset lain yang seharusnya dikelola pemerintah tak jauh beda dengan pendidikan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan, walaupun tingkatan dan kasus permasalahannya berbeda, misalnya dalam pelayanan kesehatan terutama karena sifat pelayanannya baru setingkat PUSTU, maka pengelolaan dan pemanfaatannya juga sangat sederhana dan terbatas.

“Sarana dan prasarana kesehatan yang ada hanya mampu memberikan pelayanan tingkat satu jika terjadi penyakit yang cukup kronis dan gawat darurat langsung dirujuk ke tempat lain seperti ke Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Umum Swasta ataupun ke tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dianggap representatif mengatasi dan memberikan pelayan kesehatan kepada pihak dirujuk. (Hasil Wawancara mendalam, 6-9 Januari 2016)

“Ketersediaan obat untuk orang sakit sering atau kadang mengalami hambatan. Sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa obat yang tersedia di Puskesmas/pustu diperuntukkan untuk mengobati semua jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat (Hasil Wawancara mendalam, 6-9 Januari 2016)

Uraian dan contoh-contoh di atas menunjukkan betapa aset komunitas yang dikelola oleh pemerintah di Pulau Badi belum sepenuhnya dikelola secara maksimal dan jauh dari harapan dan standar yang dibutuhkan oleh komunitas Pulau Badi.

Aset Komunitas yang dikelola oleh Warga Pulau Badi. Aset komunitas yang langsung dikelola oleh komunitas sendiri sesungguhnya mencakup semua aset komunitas yang ada, baik aset geografis, demografis, fisik bangunan dan infrastruktur, serta pelayanan masyarakat (*community services*). Aset Geografis misalnya, ini terkait dengan pulau Badi sendiri dan laut di sekitarnya beserta segala isinya. Pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab komunitas Pulau Badi. Pengelolaan pulau dan laut beserta segala isinya belum sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat Pulau Badi. Contoh-contoh kecil tentang itu bisa dilihat dari sistem pemanfaatan laut melalui sistem mata pencarian sebagai nelayan, dimana masih banyak ditemukan warga pulau melakukan pengrusakan terhadap biota laut terutama terumbu karang akibat maladaptasi (*maladaptation*) yang dilakukan sebagian nelayan pulau dalam menangkap ikan, misalnya dengan cara membius, membom, atau menggunakan alat tang-

kap jaring yang merusak terumbu karang beserta biotanya seperti Pukat dan Trawl.

Contoh lain yang terkait adalah pemeliharaan kebersihan dan lingkungan Pulau Badi. Warga Pulau masih terbiasa membuang sampah dan limbah manusia di pinggir laut/pulau, walaupun sesungguhnya sudah ada upaya membangun aset komunitas berupa adanya bank sampah yang dikelola oleh warga. Namun disayangkan bank sampah ini tidak diikuti dengan perilaku komunitas pulau dalam menjaga kebersihan dan lingkungan pulau. Padahal Bank sampah ini sesungguhnya akan memberi *benefit multi-effect* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset komunitas, dengan menghidupkan bank sampah dua aset komunitas terpelihara sekaligus yaitu:

1. Aset geografis berupa pemeliharaan dan pemanfaatan Pulau dan laut
2. Dengan sendirinya menghidupkan bank sampah sebagai aset pelayanan masyarakat (*community services*) yang dikelola langsung oleh warga. Bahkan lebih jauh, akan memperkaya aset komunitas dalam kaitannya dengan sistem mata pencaharian, terutama pengusaha “bank sampah”.

Pengadaan air bersih adalah contoh lain aset komunitas dalam bentuk pelayanan yang dikelola langsung oleh warga, walaupun seharusnya pelayanan ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintah, tapi warga pulau Badi Air bersih menjadi tanggung jawab komunitas sendiri. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa air bersih untuk keperluan minum dan masak

diperoleh dari luar Pulau, terutama dari Makassar, baik beli langsung, maupun lewat penjual air minum dalam pulau Badi. Transportasi juga langsung dikelola oleh masyarakat, terutama transportasi antar pulau, maupun transportasi menuju Kota Makassar, dan kota Pangkajenne dengan segala kekurangannya baik dari sisi ketersediaan maupun pengelolaan angkutan.

Aset-aset lain yang tumbuh dan berkembang serta dikelola dan dimanfaatkan langsung oleh komunitas pulau Badi mencakup banyak hal, terutama yang terkait dengan sistem hidup dan penghidupan (*livelihood*) mereka. Permasalahan utamanya adalah bagaimana dan seberapa jauh aset-aset itu bisa digunakan oleh komunitas warga Pulau Badi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Aset komunitas yang dikelola oleh swasta atau Pihak ketiga. Aset komunitas yang dikelola oleh pihak ketiga, baik swasta, LSM, ataupun lembaga lainnya di Pulau Badi masih bisa dihitung jari. Sejauh ini pihak yang pernah memfasilitasi, mendirikan dan memelihara aset komunitas pulau adalah dari Sawasta (perusahaan), dan Perguruan Tinggi (mahasiswa) dan LSM.

PT Mars Symbioscience adalah salah satu pihak swasta yang mencoba dan sedang membangun aset komunitas pulau Badi dalam bentuk pemeliharaan terumbu karang. Di sekitar Pulau, bagian selatan kurang lebih 200 m ada areal konservasi dan rehabilitasi terumbu karang seluas kurang lebih

7000 m2 yang dibiayai dan dikelola langsung oleh PT Mars, bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam hal ini izin melakukan konservasi dan rehabilitasi terumbu karang. Atas inisiasi PT Mars maka pemerintah Kabupaten menjadikan area konservasi dan rehabilitasi terumbu karang di Pulau Badi sebagai percontohan, dan menjadi wilayah yang dilindungi oleh Pemerintah dengan nama Daerah atau Area Taman Perlindungan Laut dan Terumbu Karang. Menurut PT Mars area konservasi dan rehabilitasi perlindungan terumbu karang ini menggunakan teknologi terbaru dan sederhana yang sudah terbukti keberhasilannya.

Kehadiran PT Mars dalam mendorong dan meningkatkan kuantitas dan kualitas aset komunitas Pulau Badi dalam bentuk rehabilitasi dan konservasi terumbu karang adalah perwujudan tanggung jawab sosial (CSR) PT Mars terhadap Masyarakat. Lebih dari itu PT Mars terpanggil untuk terlibat langsung dalam pengelolaan terumbu karang dan meningkatkan kualitas hidup komunitas Pulau, terutama komunitas Pulau Badi. Diharapkan dengan adanya daerah konservasi dan rehabilitasi terumbu karang ini komunitas Pulau, khususnya Pulau Badi semakin sadar akan pentingnya terumbu karang sebagai tempat biota laut yang menghasilkan berbagai sumber daya laut yang produktif bagi masyarakat. Bahkan dengan adanya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang ini diharapkan memiliki efek langsung terhadap komunitas pulau Badi dengan dipeliharanya sejumlah biota laut produktif di areal konservasi. Tidak hanya itu, dalam satu tahun ter-

akhir area konservasi ini telah menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang berwisata dan menikmati keindahan terumbu karang yang sudah berhasil dikonservasi dan direhabilitasi, dan ini berdampak terhadap sistem mata pencaharian komunitas pulau Badi, sekaligus membuka aksesibilitas komunikasi dan informasi dari luar pulau.

Sebagai aset komunitas dan pemanfaatannya untuk komunitas Pulau, area konservasi terumbu karang ini dalam beberapa hal belum sepenuhnya di jadikan sebagai aset komunitas. Masalahnya terletak pada sistem pengelolaan dan pemanfaatan area terumbu karang. Berdasarkan sejumlah informan, PT Mars pada awalnya mendapat resistensi sejumlah warga komunitas Pulau Badi, karena sistem pengelolaa-nya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaannya, belum melibatkan partisipasi warga komunitas Pulau Badi.

“Dulu banyak warga pulau yang tidak setuju dengan kegiatan PT. Mars di sini, salah satu bentuk penolakannya adalah adanya pengrusakan kerangkeng terumbu karang yang di tanam oleh PT. Mars. “Sikap warga tersebut disebabkan karena PT. Mars hanya melibatkan orang-orang tertentu saja di pulau ini, padahal warga pulau menginginkan agar semua masyarakat dilibatkan terutama pada saat penanaman terumbu karang, disitu warga bisa dapat uang biar sedikit yang penting mereka lebih banyak yang terlibat” (Hasil Wawancara kelompok Nelayan)

Bahkan menurut tokoh masyarakat, komunitas pulau Badi terbagi dua akibat keberadaan PT Mars dalam mengelola

aset Terumbu Karang di sekitar Pulau, yaitu kelompok kontra dan kelompok pro. Kelompok pro pada umumnya yang terlibat dalam aktivitas dan telah menikmati fasilitas dan uang dari PT. Mars. Kelompok kontra adalah mereka yang belum terlibat dalam kegiatan PT. Mars sehingga secara individu tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan PT. Mars.

“Menurut kelompok kontra sebelum aktivitas PT. Mars khususnya budidaya kuda laut yang dikelola oleh keluarga tertentu ada kesepakatan antar warga pulau yang dihadiri oleh kepala desa bahwa keuntungan dari usaha budidaya laut sebagian disisihkan untuk warga pulau akan tetapi hingga saat ini hal tersebut tidak terealisasi (Hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat, 2016)

Saat ini kelompok kontra terhadap keberadaan PT. Mars jumlahnya semakin berkurang karena mereka sudah paham bahwa isu-isu yang berkembang pada awal masuknya ternyata tidak benar dan itu sengaja dikembangkan oleh orang-orang tertentu saja. Mereka yang tadinya menolak kini justru malah menjadi pelopor dan ikut aktif mengajak warga agar terlibat dalam menjaga dan memelihara terumbu karang tersebut. Sungguhpun demikian hal yang mendasar terkait dengan pengelolaan aset ini adalah tidak maksimal keterlibatan komunitas Pulau Badi secara partisipatif dalam proses perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan atau pemanfaatan rehabilitasi terumbu karang yang di kembangkan oleh PT Mars. Akibatnya masyarakat yang tidak terlibat cenderung menganggap aset terumbu karang itu adalah milik orang luar,

milik PT Mars, bukan milik Komunitas Pulau Badi. Berikut kesaksian tokoh masyarakat akibat tidak dilibatkannya warga secara partisipatif dalam proses pembangunan aset terumbu karang di Pulau Badi.

“Keterlibatan dalam pemeliharaan terumbu karang diserahkan pada mereka yang dianggap anggota Mars, sementara mereka yang bukan anggota tidak merasa berkewajiban menjaganya. Hal ini terjadi karena Mars tidak pernah mengundang masyarakat untuk terlibat sehingga mereka yang tidak bekerja dengan Mars mengeluh tidak mendapatkan apa-apa (Hasil wawancara dengan Tokoh nelayan, Ponggawa Ilyas)

Lebih jauh menurut Ponggawa Ilyas, harus ada pertemuan secara adil dan partisipatif kedepan agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman dan penolakan terhadap program-program yang terkait dengan pengelolaan aset komunitas pulau Badi.

“Harus ada pengelolaan secara adil di mana, 1) Masyarakat harus dikumpulkan, ditanya pendapatnya. Sementara yang lalu-lalu tidak pernah ditanya. 2) Kemudian diumumkan di masjid 3) Program-program apalagi yang harus diperbaiki, masyarakat dan tokoh dipertemukan untuk saling bertukar pikiran. Penangkaran terumbu karang PT. Mars ditempatkan di jalan keluar perahu jadi sering tertabrak karena lokasi yang ditetapkan itu di kawasan dangkal. Dan 4) Sewaktu pak Ipul dari Unhas membangun konservasi terumbu karang tidak pernah menimbulkan masalah padahal kapal-kapal sering lewat daerah situ. Ini artinya kami sebagai pemilik kampung merasa dilarang-

larang oleh PT. Mars. Ke depannya pemeliharaan terumbu karang melibatkan semua warga. (Hasil Wawancara dengan Pongagwa Ilyas/Bos Tiar)

Keberadaan PT Mars di Pulau Badi tidak hanya membangun aset berupa terumbu karang, tapi juga aset komunitas lainnya terutama aset kelembagaan/pelayanan pendidikan non-formal dengan didirikannya “*Community Learning Center*”, bekerjasama dengan *Eco Natural*, salah satu LSM yang menjadi Partner PT Mars dalam proses fasilitasi dan pendampingan di Komunitas Pulau Badi. Sejumlah program telah dijalankan oleh *Eco Natural* seperti pendidikan anak-anak muda melalui PRA-MUKA Laut dan PAUD terumbu karang, termasuk penanaman sayur hidroponik melalui *community learning center*.

Namun disayangkan program-program itu juga tidak mendapat respons maksimal dari warga Pulau Badi yang berdampak pada keberlanjutan program. Di awal pendirian *Community Learning Center*, yang ditandai dengan pembangunan Balai Pertemuan di Dermaga diwarnai dengan penolakan dari sejumlah warga karena ada isu bangunan tersebut untuk kepentingan dunia hiburan dan prostitusi.

“Pembangunan balai pertemuan di dermaga pelabuhan sangat keras ditentang oleh masyarakat karena ada isu bahwa bangunan tersebut untuk kepentingan dunia hiburan khususnya untuk prostitusi” (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat).

Adanya penolakan akibat isu-isu yang tidak benar seperti di atas sesungguhnya berangkat dari tidak adanya komu-

nikasi interaktif, informatif dan partisipatif antara PT. MARS dalam hal ini *Eco natural*, termasuk Pemerintah setempat dengan komunitas Pulau Badi dalam menjalankan program-program mereka. Lebih jauh PT Mars dan Eco Natural tidak mengembangkan proses perencanaan partisipatif yang bersifat *open menu* bagi komunitas Pulau Badi, sehingga program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan aset komunitas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup komunitas pulau Badi betul-betul atas dasar kebutuhan, direncanakan, dilakukan dan dipelihara oleh komunitas Pulau Badi sendiri, bukan program atau kegiatan yang datang dari luar yang sifatnya “*top-down*”, “*memaksa*”, dan “*dipaksakan*” bagi komunitas pulau Badi.

### **Masalah dan Ekpektasi Aset Komunitas**

Pada bagian ketersediaan dan kelengkapan aset komunitas, dan pengelolaan dan pemanfaatan aset komunitas, secara tidak langsung telah diuraikan sejumlah masalah dan ekspektasi komunitas Pulau terhadap aset-aset mereka, aset geografis, demografis, fisik dan infrastruktur, serta pelayanan masyarakat (*community services*). Data yang terkumpul melalui proses FGD, survei, dan wawancara pada prinsipnya menunjukkan bahwa sesungguhnya aset komunitas pulau Badi justru terkait dengan dua aspek utama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu ketersediaan dan kelengkapan aset komunitas dan sistem pemanfaatan dan pengelolaan aset komunitas.

Masalah pertama terkait dengan minimnya kuantitas dan kualitas ketersediaan dan kelengkapan aset komunitas. Masalah ini juga terkait dengan aksesibilitas (ruang dan waktu) komunitas pulau badi terhadap aset komunitas yang ada. Banyak contoh telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan aset komunitas jauh dari kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan, misalnya dalam aset pelayanan komunitas (*community services*), seperti pendidikan (hanya SD dan SMP) yang kekurangan guru, pelayanan kesehatan hanya puskesmas pembantu, penerangan listrik hanya berfungsi pada malam hari, pelayanan kebutuhan air bersih harus membeli dari Makassar, dan seterusnya.

Masalah kedua terkait dengan sikap dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan yang buruk dan tidak maksimal terhadap berbagai aset komunitas, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta (pihak ketiga) maupun komunitas sendiri. Misalnya sikap dan tindakan maladaptasi (*maladaptation*) nelayan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset laut yang masih menggunakan bom, bius, pukat dan *trawl* dalam menangkap ikan; tindakan warga pulau yang masih membuang sampah dan limbah di laut; sikap dan tindakan guru-guru SD dan SMP komunitas pulau Badi yang tidak memberi pelayanan pengajaran secara maksimal dan rutin; tindakan warga yang pernah merusak areal konservasi terumbu karang yang di kelola oleh PT Mars; dan seterusnya. Sikap dan tindakan-tindakan seperti itu sesungguhnya tidak lepas dari buruknya sistem pengelolaan dan pemanfaatan aset komunitas yang ada di Pulau Badi.

Harapan akan aset komunitas Pulau Badi terletak pada sejauh mana dua aspek permasalahan di atas bisa teratasi dengan menempatkan “komunitas” pulau Badi sebagai pengelola, pemelihara dan pemanfaatan aset komunitas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan (*livelihood*) mereka. Prinsip dan praktik partisipatif harus ditumbuhkembangkan dalam mengelola dan memanfaatkan aset komunitas, baik yang dibentuk oleh pemerintah, swasta (pihak ketiga), apalagi aset komunitas yang dikelola langsung oleh komunitas sendiri. Tokoh Masyarakat (*Ponggawa Ilyas*) mencontohkan harapan pengelolaan dan pemanfaatan penangkaran terumbu karang oleh PT Mars sebagai aset komunitas pulau Badi dengan cara partisipatif melalui musyawarah

“Harus ada pengelolaan secara adil di mana, 1) Masyarakat harus dikumpulkan, ditanya pendapatnya. Sementara yang lalu-lalu tidak pernah ditanya. 2) Kemudian diumumkan di masjid 3) Program-program apalagi yang harus diperbaiki, masyarakat dan tokoh dipertemukan untuk saling bertukar pikiran.... Ke depannya pemeliharaan terumbu karang melibatkan semua warga. (Hasil Wawancara dengan Pongagwa Ilyas/Bos Tiar)

Apa yang disarankan oleh *Ponggawa Ilyas* di atas adalah sebuah harapan sekaligus menempatkan proses-proses partisipatif dalam mengelola dan memanfaatkan aset komunitas, tidak hanya yang dibentuk atau didirikan oleh PT Mars, tapi juga aset komunitas yang dikelola oleh pemerintah, maupun warga pulau Badi sendiri.

Sistem pengelolaan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan akan melahirkan sikap dan tindakan “*sense of community*”, “*sense of identity*”, dan “*sense of belonging*” yang kuat terhadap berbagai aset komunitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan yang lebih baik.



# 3

## MODAL SOSIAL KOMUNITAS PULAU

**M**odal sosial adalah segala potensi yang dapat mendorong terciptanya hubungan dan kerja sama yang didasari oleh nilai, norma dalam membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Konsep modal sosial yang dianalisis dalam kajian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Bank Dunia. Adapun elemen modal sosial menurut Bank dunia adalah meliputi: (a) kelompok dan jaringan, (b) Kepercayaan dan solidaritas, (c) Aksi kolektif dan

kerjasama, (d) Informasi dan komunikasi, (e) Inklusi dan kohe-  
si sosial, (f) pemberdayaan dan tindakan politik. Elemen modal sosial yang dirumuskan oleh Bank Dunia tersebut menjadi pola dalam menggambarkan potensi modal sosial komunitas Pulau Badi.

## **Kelompok dan Jaringan**

Kelompok dimaksudkan sebagai jumlah kesatuan orang-orang yang hidup bersama karena hubungan diantara mereka (Soekanto). Secara umum jaringan dimaknai sebagai sekumpulan elemen yang saling berhubungan dalam melakukan fungsi khusus untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini hubungan dapat saja terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun skala yang lebih kecil. Granover (1985) melukiskan hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan yang melekat dalam hubungan pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan) itu. Setiap individu atau kelompok mempunyai akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai.

Komunitas pulau Badi memiliki beberapa kelompok, seperti kelompok PKK, majelis taklim, karang taruna, remaja masjid kelompok barzanji dan kelompok nelayan. Namun kelompok yang ada tersebut sebagian besar tidak aktif. Suatu kelompok yang tidak aktif biasanya disebabkan oleh beberapa hal antara proses pembentukannya tidak didasari oleh kesadaran bersama, sistem kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kultur bagi anggotanya, tujuan kelompok tidak dirumuskan dengan jelas, rendahnya sumber daya manusia bagi

para anggotanya, tidak ada program dan kegiatan yang jelas dan tidak dilakukan pertemuan secara rutin.

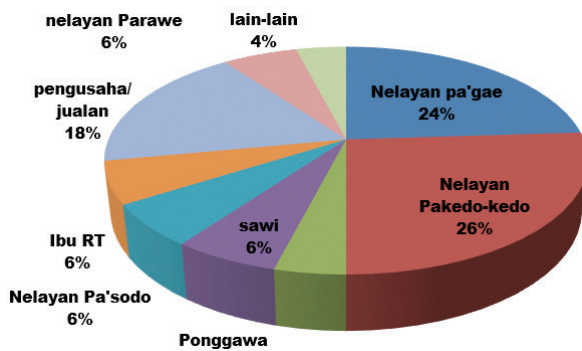
Sejumlah kelompok yang ada pada komunitas pulau Badi, hanya kelompok nelayan yang aktif. Keaktifan kelompok nelayan tersebut karena keanggotaan memiliki hubungan sosial dan hubungan kerja yang kuat, keberadaan kelompok berperan memenuhi kebutuhan bagi anggotanya, kelompok memiliki tujuan yang jelas yakni meningkatkan produksi tangkapan ikan dan memiliki pemimpin dan gaya kepemimpinan yang bisa diterima oleh anggotanya. Hal paling mendasar yang dimiliki oleh kelompok nelayan komunitas pulau Badi adalah hubungan dan interaksi sesama anggota sangat intens, sehingga menimbulkan rasa kebersamaan dan kohesivitas serta solidaritas internal. Seiring dengan hasil FGD yang dilakukan seperti berikut:

“Kalau di Pulau Badi tidak ada kelompok atau organisasi karena disini tidak terlalu banyak orang paling kalau ada kelompok hanya kelompok-kelompok nelayan itupun tidak tetap kadang aktif kadang tidak. Selama ini tidak pernah terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok tersebut karena yang berkelompok ada hubungan keluarga semua jadi kalau ada masalah yang terjadi cepat diselesaikan dan kalau kita lihat sehari-harinya semuanya saling membantu kalau ada yang membutuhkan bantuan seperti kalau ada yang bangun rumah kita saling membantu termasuk anak-anak muda “. (FGD di bawah 20 Tahun).

“Kalau kumpul-kumpul warga disini tidak sering juga tetapi kadang-kadang kita berkumpul untuk membahas permasalahan yang terjadi di lingkungan kita di

sini. Permasalahan yang sering kita diskusikan di sini adalah masalah pendidikan atau sekolahnya anak-anak kita, masalah ekonomi, pendapatan kita yang umumnya warga kita di sini adalah nelayan selain itu kadang juga kita bahas permasalahan pulau kita ini yang makin terkikis oleh ombak juga masalah kesehatan yang biasa kita alami di Pulau Badi ini”. (FGD Usia 20 sampai 40 tahun)

Kelompok yang dimiliki oleh komunitas Pulau Badi, hanya kelompok nelayan yang berpotensi untuk menjadi modal sosial. Modal sosial kelompok di samping dapat menjadi perekat bagi sesama anggota (*bonding social capital*), juga bisa untuk menjadi fasilitas untuk membuka jaringan dan kerja sama bagi kelompok lain (*Bridging social capital*). Kekuatan kelompok nelayan sebagai modal sosial perekat karena sifatnya yang homogen dan karena ikatan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian utama bagi komunitas. Dalam grafik berikut yang menggambarkan suatu kasus keluarga yang memiliki sumber mata pencaharian sebagai nelayan.



**Gambar 4.** Pekerjaan Rata-rata Anggota Keluarga dalam Rumah Tangga

Kelompok dan organisasi yang dimiliki oleh komunitas Pulau Badi tidak mempunyai sumber daya yang kuat dalam membangun serta memfasilitasi terbentuknya hubungan dan kerja sama dengan pihak lain. Kelompok nelayan adalah satu-satunya kelompok yang dianggap aktif oleh warga komunitas, namun modal aktif saja belum menjamin untuk dapat membangun jaringan, apalagi yang belum atau tidak aktif.

Untuk dapat membangun jaringan dan kerja sama antar suatu kelompok dengan kelompok lain, atau antar komunitas diperlukan adanya kepercayaan (*trust*). Kepercayaan (*trust*) bukan hanya kejujuran, tapi juga dipercaya memiliki kapabilitas anggota kelompok yang memadai. Kedua syarat tersebut menjadi dasar utama dalam membangun jaringan sebagai modal sosial.

Komunitas Pulau Badi selama ini telah terjadi hubungan dan kerja sama dengan pihak luar, tetapi bukan didasarkan pada modal sosial jaringan. Kerja sama yang selama ini terjadi didasarkan pada daya tarik yang bersifat fisik dan lingkungan. Modal fisik lingkungan komunitas pulau Badi menjadi daya tarik dari pihak luar untuk datang atau berkunjung untuk menikmati keindahan alam khususnya berwisata bahari (menyela lam ).

## **Kepercayaan dan Solidaritas**

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana kita memiliki keyakinan pada-

nya atau kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau keyakinan akan kebenaran. Sementara solidaritas adalah rasa kebersamaan, kesatuan kepentingan, rasa simpati sebagai salah satu dari anggota dalam komunitas yang sama. Solidaritas juga merupakan sikap ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Komunitas Pulau Badi memiliki potensi kepercayaan dan solidaritas yang tinggi. Potensi tersebut didasarkan pada fakta bahwa komunitas ini telah hidup bersama dalam waktu yang lama dan didasari oleh nilai dan norma interaksi yang sama. Komunitas inipun memiliki ikatan yang begitu kuat karena didasari oleh ajaran agama Islam dan nilai sosial kultural sebagai etnis Bugis-Makassar. Dalam agama Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk saling tolong menolong dalam kebajikan, implementasi dari ajaran tersebut warga komunitas Pulau Badi mewujudkannya dalam bentuk kerjasama dan bantu membantu dalam kegiatan sosial-budaya seperti ketika ada kedukaan, pesta perkawinan, menyelesaikan konflik termasuk bantu membantu dalam penyediaan pinjaman modal usaha. Praktik bantu membantu dalam pemberian pinjaman modal hampir seluruhnya tidak mensyaratkan adanya agunan kecuali yang dituntut adalah komitmen dan kepercayaan, bahkan dalam pemberian bantuan perjanjiannya tidak formal tertulis tetapi hanya didasarkan pada pernyataan secara lisan. Artinya bahwa komunitas pulau Badi sudah lama mengimplementasikan prinsip saling percaya dalam kehidupan sosialnya.

Solidaritas bagi komunitas Pulau Badi banyak terwujud dalam bentuk solidaritas yang bersifat mekanis artinya bahwa rasa kebersamaan, kesatuan, rasa tanggung jawab dan saling menghargai diantara mereka karena memiliki kesamaan seperti agama, suku, pekerjaan, keturunan dan kekerabatan. Potensi homogenitas inilah yang membuat komunitas ini melahirkan kesadaran kolektif karena merasa memiliki kesamaan nilai dan norma sebagai warga komunitas pulau. Solidaritas sosial mekanis ini pun muncul dalam praktik profesi sebagai nelayan, di mana mereka memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam proses penangkapan ikan. Ketika ada nelayan yang mengalami masalah di laut mereka saling membantu dalam memberi pertolongan. Semangat saling menolong dalam kelompok nelayan didasari oleh rasa kepercayaan dan tanggung jawab sebagai warga yang telah lama hidup bersama dalam suatu komunitas.

“Kalau kita di Pulau Badi ini boleh dikatakan kita sama semua artinya tidak ada yang sangat berpengaruh karena setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, kita musyawarahkan dan selesaikan secara bersama-sama meskipun memang ada orang-orang tertentu yang kita anggap dituakan akan tetapi dalam mengatasi permasalahan semua dapat terlibat secara bersama “ (FGD usia 20 sampai 40 tahun)

## **Aksi Kolektif dan Kerja Sama**

Aksi kolektif dimaknai sebagai bentuk perilaku dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyele-

saikan masalah bersama. Tindakan bersama yang dilakukan oleh warga komunitas diawali dengan kepedulian dan solidaritas. Kerja sama sebagai bentuk interaksi antara individu dengan individu dalam suatu komunitas atau antara dua komunitas untuk mencapai tujuan bersama.

Komunitas Pulau Badi dipersatukan dalam berbagai kesamaan, sehingga sumber daya dan kemampuan pemenuhan kebutuhan juga relatif sama. Tindakan dan tradisi yang dilakukan dengan muda dapat dipahami oleh warga komunitas.

“Permasalahan yang pernah kita diskusikan secara bersama-sama dengan warga lain yaitu masalah pendidikan. Di Pulau Badi ini ada dua sekolah dasar dan satu SMP jadi semua anak-anak kita yang telah cukup umurnya untuk sekolah kita masukkan di sana karena tidak ada pilihan lain kecuali kalau mau kita keluar pulau seperti ke Makassar, tapi kalau masih SD umumnya di sini saja. Permasalahan yang sering kita keluhkan sebagai orang tua di sini adalah waktu belajarnya anak-anak kita di sekolah karena dalam satu minggu sering sekali hanya tiga kali seminggu belajar tergantung kehadiran guru. Guru yang telah ditugaskan tidak tinggal di sini atau tinggal di Luar Pulau Badi sehingga sangat susah untuk masuk setiap hari. Sehingga kadang kita berpikir bahwa guru yang telah ditugaskan di sini tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ini termasuk perilaku korupsi. Jadi hampir setiap hari sekolah anak-anak kita justru hanya bermain di lapangan dengan tetap memakai pakaian seragamnya. Begitu juga masalah kesehatan bahwa kadang tidak ada tenaga medis yang bisa menangani kalau misalnya warga ada yang sakit, se-

hingga sering warga kita yang sakit kita bawah berobat ke Pulau Sarappo selain masalah waktu karena jauh juga masalah pembiayaan atau sewa perahu dan di dalam perjalanan bisa tambah sakit karena besarnya ombak misalnya. Khusus terkait dengan pelayanan administrasi di kantor desa kadang juga tidak berjalan lancar karena Kepala Desa kita di sini tidak berdomisili di sini ditambah lagi kepala dusun/ lingkungan yang tidak terlalu peduli dengan kondisi masyarakat. Kepala dusun kita di sini nanti aktif kalau ada petugas yang datang dari kecamatan atau kabupaten”. (FGD usia 20 sampai 40 tahun)

Warga Pulau Badi biasa bergotong royong, tapi gotong royong lebih banyak terlihat ketika ada kegiatan pengantin, sementara untuk mengatasi masalah jarang, terutama berkumpul untuk membahas isu tertentu yang dihadapi masyarakat, memperbaiki masalah, meningkatkan kualitas hidup, atau semacamnya.

“Biasa Gotong Royong, saling membantu...” Warga hanya melakukan gotong royong ketika ada kegiatan pengantin, jarang melakukan gotong royong untuk bersih-bersih pulau.” (Notulensi dan transkrip FGD).

## **Informasi dan Komunikasi**

Setiap komunitas memerlukan informasi dan komunikasi untuk membangun hubungan dan kerja sama diantara warga secara internal dan hubungan eksternal terhadap komunitas lain. Dalam era modern sekarang ini informasi dan komunikasi

merupakan salah satu potensi dalam membangun komunitas. Komunitas yang tidak memiliki sistem informasi dan komunikasi yang terbuka akan mengalami hambatan dalam proses adaptasi terhadap perkembangan kemajuan yang terjadi di luar.

Komunitas Pulau Badi sebagai suatu entitas memiliki sistem informasi dan komunikasi yang selama ini digunakan dalam berinteraksi dengan sesama warga baik secara internal maupun secara eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Pulau Badi menggunakan beberapa sumber dan sarana informasi yaitu para pendatang seperti mahasiswa, peneliti, konsultan, teman dan keluarga yang berkunjung, televisi, koran dan warga komunitas sendiri yang memiliki mobilitas fisik yang tinggi seperti warga yang sering keluar tinggalkan pulau, nelayan yang melakukan penangkapan di luar pulau Badi. Sementara sarana komunikasi yang biasa digunakan adalah telepon seluler, dari mulut ke mulut (*face to face*), rapat, musyawarah, tempat hajatan warga, kelompok-kelompok nelayan, masjid dan kegiatan sosial lainnya.

Pola penyaluran informasi dan komunikasi yang sering dan efektif digunakan selama ini adalah melalui rapat pertemuan dan pengumuman atau penyampaian melalui masjid, Kedua pola dan sarana informasi dan komunikasi tersebut cukup efektif dalam meminimalisir misinformasi dan komunikasi antar warga komunitas. Masjid memiliki sarana (menara dan *sound system*) yang memiliki jangkauan luas dalam menyampaikan informasi kepada warga serta sumber informasi dipastikan dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat pertemuan warga juga merupakan sarana informasi dan komunikasi yang baik bagi warga, karena dihadiri oleh tokoh dan pemuka masyarakat baik formal dan informal sehingga legalitas serta akurasinya terkendali.

Kelompok-kelompok nelayan juga menjadi sarana dalam menyebarkan informasi dan komunikasi yang tepat, karena kelompok ini mempunyai keanggotaan yang paling banyak dan tersebar pada seluruh wilayah pulau, bahkan bukan hanya secara internal pulau tetapi juga antar pulau.

Penggunaan sarana informasi dan komunikasi dengan teknologi modern seperti media televisi, koran dan telepon seluler juga ada tetapi dari segi efektivitas dan legalitas pesan masih perlu dikonfirmasi. Teknologi informasi dan komunikasi modern tersebut bagi warga komunitas pulau Badi belum semua memiliki dan memahami bahkan masih terkendala dengan jaringan signal.

Pada intinya untuk menyalurkan informasi dan komunikasi bagi warga komunitas pulau Badi sekarang ini efektif dengan menggunakan ketiga pola dan sarana tersebut yaitu rapat pertemuan warga, media masjid dan kelompok-kelompok nelayan. Oleh karena itu bagi pihak mana saja yang akan melakukan aktivitas dalam rangka pemberdayaan komunitas Pulau Badi seyogianya memanfaatkan ketiga potensi yang dimaksud dalam rangka menyalurkan informasi dan komunikasi.

Ketiga potensi sarana dan prasarana informasi dan komunikasi tersebut merupakan modal dasar yang dimiliki oleh

warga komunitas Pulau Badi yang tergolong sebagai modal sosial. Seperti pertemuan warga dapat membangun kebersamaan dan kohesivitas melalui interaksi yang terjadi dalam pertemuan tersebut, Media masjid yang merupakan lembaga yang sakral dan sangat dipercaya oleh warga, sehingga segala informasi yang disampaikan melalui masjid terjamin kebenaran dan keakuratannya, Selanjutnya kelompok nelayan sebagai kelompok yang paling aktif dan secara emosional sangat dekat dengan sesama anggotanya karena memiliki intensitas pertemuan yang sangat tinggi, sehingga informasi dan komunikasi dapat lebih mudah tersampaikan.

## **Inklusi dan Kohesi Sosial**

Komunitas yang inklusi adalah suatu komunitas atau lingkungan yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga tanpa terkecuali saling menghargai, menerima dan menghargai perbedaan. Inklusi sebagai suatu sikap keterbukaan dan penerimaan warga komunitas terhadap berbagai perbedaan yang dapat menghambat kebersamaan. Sementara kohesi sosial merupakan unsur penting dalam suatu komunitas untuk terjadinya kekompakan dan keakraban antara sesama warga komunitas. Menurut (Robbins, 2001), kohesivitas sosial adalah sejauh mana anggota merasa tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada dalam kelompoknya. Seiring dengan kohesivitas sebagai suatu kekuatan ketertarikan anggota yang tetap pada kelompoknya dari pada kelompok lain, (Gibson,2003).

Komunitas Pulau Badi memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya inklusi dan kohesivitas sosial, oleh karena komunitas ini memiliki banyak kesamaan atau tingkat homogenitas yang tinggi. Tingkat homogenitas yang tinggi yang dimiliki oleh komunitas tersebut meliputi kesamaan dalam latarbelakang budaya, satu rumpun keluarga, kesamaan suku, kesamaan mata pencaharian sebagai nelayan, kesamaan agama Islam, kesamaan bahasa Bugis-Makassar, kesamaan status sosial, dan kesamaan status ekonomi.

Potensi lain yang mencerminkan kondisi inklusi dan kohesivitas sosial adalah komunitas ini jumlah anggotanya kecil dan wilayahnya yang sempit memungkinkan hubungan dan interaksi lebih mudah dan akrab. Karena antara sesama warga saling-kenal mengenal antara satu dengan lainnya. Komunitas ini juga memiliki pemimpin dan tokoh masyarakat terpercaya dan sebagai simbol dalam merekatkan serta mempersatu bagi warganya. Kalau terjadi gesekan antar warga dapat dengan mudah diselesaikan melalui fasilitas dan mediasi tokoh masyarakat.

Wujud inklusi dan kohesivitas yang dimiliki oleh komunitas ini adalah penerimaan dan keterbukaan terhadap para tamu yang datang ke pulau ini, warga komunitas menerima dengan penuh keramahan dan keterbukaan yang ditunjukkan pula dengan kesiapan mereka untuk dijadikan rumahnya sebagai tempat tinggal sementara. Kesediaan menerima tamu dengan tangan terbuka dan penuh keramahan, didasarkan pada prinsip dan ajaran yang mereka pahami dalam Islam

bahwa tamu harus dihargai dan dihormati karena di samping mendapatkan pahala juga tamu sebagai pembawa rejeki dan keselamatan.

## **Pemberdayaan dan Tindakan Politik**

Pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) adalah suatu upaya dan tindakan melibatkan warganya dalam proses pembangunan. Pemberdayaan sangat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan, termasuk pelibatan warga dalam menentukan pilihan politik mereka.

Keterlibatan warga Pulau Badi dalam menentukan pemimpin baik untuk pemimpin lokal kepala desa maupun kepala daerah (Bupati) sangat baik. Tingkat partisipasi warga komunitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam bentuk pemilihan pemimpin sangat tinggi

Tindakan politik komunitas dalam menentukan kepala daerahnya juga sangat baik, bahkan hampir seratus persen tingkat partisipasinya. Dalam pemilihan bupati (Pilkada) baru-baru ini warga komunitas dalam menentukan pilihannya hampir berimbang antara calon *incumbent* bupati dengan calon dari wakilnya, perbedaan jumlah suara sangat tipis.

Berdasarkan dua kasus pemilihan pemimpin tersebut warga komunitas Pulau Badi dapat dikatakan memiliki pemberdayaan politik yang baik, khususnya dalam menentukan pemimpin yang terbaik menurut pilihan mereka. Komunitas

Pulau Badi memiliki *bargaining* politik yang cukup diperhitungkan oleh karena memiliki jumlah penduduk yang signifikan dibandingkan dengan beberapa pulau yang ada di sekitarnya.

Keberdayaan politik komunitas Pulau Badi sangat dipengaruhi pula oleh kekuatan kelompok nelayan, khususnya kelompok *pong-gawa*. Pola hubungan antara *pong-gawa* dan sawi dalam komunitas nelayan Pulau Badi masih sangat kuat. Selanjutnya yang turut mewarnai kekuatan politik pulau adalah kelompok atau tokoh agama (Islam) yang selama ini dipandang sebagai orang terpercaya baik kultural maupun ajaran atau ideologi Islam. Hal ini terkait dengan sejarah bahwa warga komunitas pulau Badi ini awalnya dihuni oleh keturunan sayyek (syeh). Syeh dalam status sosial komunitas pulau badi dipandang dan ditempatkan pada strata atas. Oleh karena itu dalam komunitas Pulau Badi ini kedua kekuatan ini (*Pong-gawa* dan tokoh agama) memberi pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan pilihan politik bagi komunitas. Kedua kekuatan tersebut bisa melebur menjadi satu oleh karena *pong-gawa* juga sebagai tokoh agama atau sebaliknya tokoh agama juga menjadi *pong-gawa* dalam hubungan profesi sebagai nelayan. Oleh karena itu kekuatan politik komunitas nelayan sangat ditentukan oleh kedua kelompok tersebut dan sangat menentukan juga kepada aspek sosial lain bagi komunitas.



# 4

## KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN KOMUNITAS PULAU BADI

**K**omunitas adalah sejumlah individu manusia yang hidup dalam suatu wilayah, yang berinteraksi satu sama lain dalam waktu tertentu memiliki nilai dan norma serta berbagai aturan lainnya dan mengikat bagi setiap individu di dalamnya. Setiap individu dalam suatu komunitas memiliki tujuan dalam kelangsungan kehidupannya.

Komunitas pulau Badi yang secara sosial hidup dan berkembang dalam suasana desa pesisir, di mana mayoritas warganya hidup dengan mengandalkan laut sebagai sumber daya utama dalam menopang kehidupan sosial ekonominya. Komunitas Pulau Badi dilatarbelakangi oleh mayoritas etnis Bugis dan Makassar. Seratus persen warga Pulau Badi menganut agama Islam, Hal ini tidak terlepas dari sejarah yang menyertainya serta aktivitas sosial yang bernuansa islami seperti tradisi baca barzanji atau zikir dan perayaan hari besar Islam lainnya.

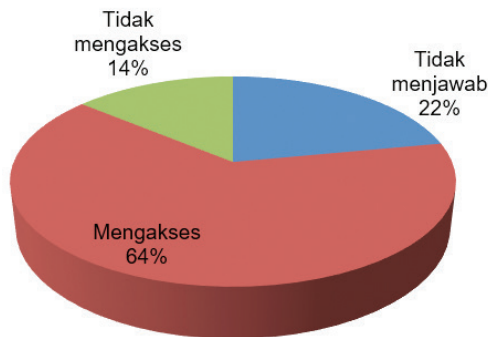
Pulau Badi hampir seluruh warganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Secara sosial kehidupan komunitasnya hampir sama atau tidak terjadi stratifikasi sosial yang tajam. Walaupun dalam struktur sosial nelayan dikenal dengan adanya *pongawa* dan *sawi* (patron-klien), tetapi dalam kehidupan sosial khususnya simbol status seperti rumah, kendaraan dan simbol-simbol lainnya tidak signifikan perbedaannya.

## **Manajemen Kredit**

Salah satu sumber pinjaman masyarakat Pulau Badi khususnya para nelayan kecil adalah para bos/punggawa pemilik modal. Sebelum mereka melaut para nelayan kecil/pemancing terlebih dahulu melakukan pinjaman kepada bos untuk memenuhi kebutuhan memancing dan juga untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Salah satu bentuk aturan peminjaman yang secara tidak tertulis disepakati bahwa hasil tangkapan para nelayan pemancing tersebut harus dijual kepada bos atau

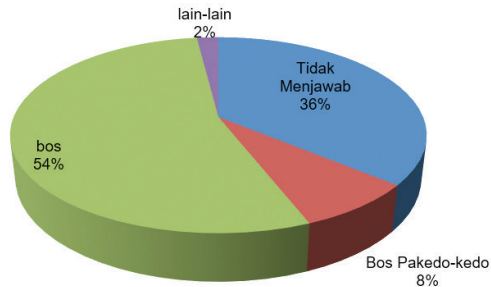
punggawa yang telah memberikan atau meminjamkan modal sebelumnya atau tidak boleh hasil tangkapannya dijual kepada pihak lain. Jika ada nelayan yang akan menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain maka terlebih dahulu harus melunasi utang-utangnya kepada punggawa pemberi pinjaman tersebut. Atas aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak selalu konsisten dan berkomitmen untuk menjalankannya dan tidak pernah yang melanggar. Tradisi saling percaya yang diterapkan oleh komunitas nelayan dalam urusan pinjam-meminjam sudah tertanam sejak dahulu kala sampai sekarang.

Hampir tidak ada alternatif khususnya nelayan pemancing untuk melakukan pinjaman dari pihak lain kecuali kepada *pongawa*, meskipun pada prinsipnya mereka ingin melepaskan ketergantungan secara ekonomi dari pihak punggawa tersebut. Salah satu sumber pinjaman masyarakat pulau badi khususnya para nelayan kecil adalah para *bos/pongawa* pemilik modal. Berikut ini terkait dengan akses warga komunitas dalam menerima pinjaman/kredit.



**Gambar 5.** Akses Kredit

Selanjutnya data dan informasi tentang tempat warga komunitas Pulau Badi dalam mengakses kredit selama ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 6.** Tempat Warga Mengakses Kredit Bantuan Modal

## **Konsumsi Sumber Daya/Akses**

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari warga Pulau Badi seperti beras, sayuran, telur didatangkan dari luar khususnya dari Kota Makassar yang jaraknya dapat ditempuh sekira 2 jam perjalanan dengan menggunakan perahu motor. Bahkan ikan pun juga sebagian didatangkan dari luar.

Untuk pemenuhan kebutuhan sayuran selain mendatangkan dari luar juga dapat disediakan dari dalam pulau dengan mengembangkan penanaman pohon kelor dan tanaman jangka panjang lainnya. Kebutuhan air minum juga sebagian didatangkan dari Makassar kecuali pada musim hujan karena umumnya warga memanfaatkan air hujan yang telah ditampung sebagai salah satu sumber air minum. Untuk ke-

butuhan mandi dan cuci bersumber dari air sumur gali yang ada disekitar rumah masing-masing

Komunitas Pulau Badi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat mengakses sumber daya yang tersedia. Hasil pemetaan dan pengamatan terhadap potensi sumber daya yang tersedia di pulau ini bisa dikatakan cukup lengkap. Namun beberapa sumber daya tersebut tidak didukung dengan pengelolaan dan pemeliharaan sehingga sumber daya tersebut tidak optimal dimanfaatkan oleh warga komunitas. Seperti sumber daya listrik belum mampu memenuhi kebutuhan komunitas secara maksimal, karena hanya mampu aktif / selama 12 jam dalam sehari semalam. Termasuk sumber daya air bersih/minum yang mengandalkan tiga sumber yakni sumur, tadah air hujan dan mesin penyulingan air. Khusus mesin penyulingan air sampai saat ini tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh warga karena rusak.

“Warga pulau ini sangat kesulitan untuk pemenuhan air bersih, karena untuk memenuhi hal tersebut mereka harus ke Makassar terutama pada musim kemarau, tapi kalau musim hujan mereka dapat memanfaatkan tadah air hujan sebagai kebutuhan air bersih. Dulu pernah ada teknologi pengelolaan air bersih yang langsung dapat diminum, namun tidak berlangsung lama karena setelah ada peralatannya rusak masyarakat tidak mampu memperbaikinya karena peralatannya terlalu mahal harganya. Selama berlangsung kurang lebih 2 tahun memang ada dana terkumpul dari harga air namun tidak seberapa”.  
(Wawancara Kelompok Tokoh Masyarakat)

## Pembuangan Limbah

Pembahasan mengenai limbah, terkait dengan komunitas di Pulau Badi ada dua jenis limbah yaitu limbah rumah tangga (sampah) dan limbah manusia (kotoran). Limbah rumah tangga sudah mulai menjadi permasalahan di samping karena jumlahnya yang semakin bertambah, juga tempat pembuangan limbah yang semakin terbatas. Peningkatan volume sampah dewasa ini, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di pulau sementara luas pulau semakin dirasakan sempit. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemukiman penduduk pulau Badi cukup padat menghampiri kepadatan pada pemukiman padat yang ada di Makassar. Informasi dari warga bahwa dahulu sampah belum menjadi permasalahan. yang mendesak untuk diselesaikan.

“Sampah dianggap tidak menjadi masalah (menyusahkan) karena selama ini lebih sering kali dibuang ke laut. Hal ini dilakukan karena tidak ada tempat khusus untuk sampah khususnya sampah rumah tangga”.

Setengah jumlah warga di pulau ini telah sadar akan pengelolaan sampah sehingga sudah tidak membuang lagi sampah ke laut, akan tetapi setengahnya juga warga tetap membuang ke laut dengan alasan sadar bahwa itu tidak benar tapi tidak memiliki pilihan tempat buang sampah.

“Peserta telah mengetahui adanya bank sampah tapi itu hanya untuk sampah plastik saja... Berfikir untuk menjadi pelopor kebersihan tapi dirasakan oleh pe-

serta lebih banyak yang tidak peduli. Keterampilan pengelolaan sampah belum pernah didapatkan” .

Selanjutnya sampah manusia (kotoran), ada kebiasaan warga komunitas pulau Badi dahulu untuk membuang kotoran (BAB) di pinggir laut dengan alasan praktis dan tidak merepotkan. Kebiasaan ini dan saat sekarang sudah mulai ditinggalkan kecuali beberapa warga yang sudah tua (manula). Untuk golongan orang mudah (remaja) hampir tidak ditemukan lagi yang buang air besar di pinggir laut. Kebiasaan ini sudah berubah khususnya bagi generasi mudah, karena hampir semua rumah tangga yang ada di Pulau Badi sudah memiliki WC.

## **Perlindungan Sosial**

Jaminan dan bantuan modal usaha Perlindungan sosial terhadap komunitas Pulau Badi hanya dilakukan secara formal melalui jaminan kesehatan, pendidikan, kecelakaan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam bentuk kartu jaminan sosial. Warga komunitas pulau Badi belum mampu melakukan atau mengakses secara mandiri lembaga-lembaga perlindungan sosial formal lainnya seperti lembaga asuransi swasta.

Untuk mengakses lembaga perlindungan sosial selain yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat memiliki keterbatasan ekonomi dan belum dipahaminya secara mendasar tentang tujuan dan pentingnya melakukan perlindungan sosial terhadap diri dan anggota keluarga lainnya.

## **Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

Secara umum bahwa penyakit yang sering dialami warga komunitas Pulau Badi antara lain; ISPA, gatal-gatal, diare dll. Masih ada yang percaya dan mempercayakan pada dukun dan jampi-jampi. Akan tetapi secara umum bahwa warga yang mengalami penyakit gawat darurat diatasi dengan memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggal dan di pulau lain yang dianggap lebih lengkap sarana dan prasarananya seperti di Pulau Sarappo ataupun langsung ke Makassar. Masih ada yang percaya dan mempercayakan pada dukun dan jampi-jampi.

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada hanya mampu memberikan pelayanan tingkat satu jika terjadi penyakit yang cukup kronis dan gawat darurat langsung dirujuk ke tempat lain seperti ke Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Umum Swasta ataupun ke tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dianggap representatif mengatasi dan memberikan pelayan kesehatan kepada pihak dirujuk.

Ketersediaan obat untuk orang sakit sering atau kadang mengalami hambatan. Sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa obat yang tersedia di Puskesmas/pustu diperuntukkan untuk mengobati semua jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat.

Tingkat kesejahteraan suatu komunitas dapat ditentukan dengan tiga indikator yaitu aktivitas, institusi dan kebijakan yang mendukung. Kalau merujuk pada indikator

yang disebutkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa warga komunitas Pulau Badi kesejahteraannya belum maksimal, karena ketiga indikator standar semuanya belum maksimal.

## **Gizi**

Meskipun kegiatan utama masyarakat adalah nelayan (nelayan pemancing) akan tetapi ada kecenderungan bahwa ikan bukan merupakan sumber protein yang utama, selain karena volume tangkapan yang terbatas juga karena sebagian besar hasil tangkapan dijual ke punggawa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya. Kurangnya potensi sayuran dalam lingkungan pulau kecuali pohon kelor dan sukun sehingga sebagian besar pemenuhan kebutuhan sayuran didatangkan dari Makassar dan sekitarnya

Akses terhadap pemenuhan makanan bergizi yang bersumber dari dalam wilayah pulau sangat terbatas baik protein maupun nabati. Ketergantungannya sangat besar dari luar pulau seperti dari Makassar dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan makanan bergizi tersebut. Ada kecenderungan bahwa konsumsi makanan instan seperti mi instan cukup besar khususnya untuk pemenuhan makanan anak-anak.

Baik kuantitas maupun kualitas makanan cukup terbatas khususnya makanan pokok atau sembilan bahan pokok. Tidak ada mekanisme stok penyediaan kebutuhan makanan pokok yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pulau

Ada kecenderungan bahwa proporsi jumlah maupun kualitas makanan khususnya pada anak-anak sangat terbatas, makan dalam bentuk camilan kemasan banyak dikonsumsi oleh anak-anak, hal tersebut juga terkonfirmasi dengan banyaknya sampah-sampah makanan kemasan yang terbuang di lingkungan pulau.

Warga komunitas Pulau Badi juga memiliki tradisi untuk tidak sarapan atau makan pagi, kecuali berupa kue-kue dengan air panas (kopi dan teh). Kecenderungan warga hanya makan 2 kali dalam sehari semalam dengan menu terbatas (nasi + ikan) sayur tidak wajib kecuali menambahnya dengan mie instan. Konsumsi buah-buahan juga sangat terbatas, karena potensi lokal juga terbatas dan hanya diperoleh dari luar seperti dari Makassar atau dari Pangkep.

## **Lingkungan dan Persepsi Pendidikan**

Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi di Pulau Badi antara lain ; permasalahan sampah khususnya sampah rumah tangga yang belum di kelola secara baik. Permasalahan abrasi akibat arus dan hantaman ombak khususnya Pulau Badi di bagian selatan yang telah menghancurkan beberapa rumah penduduk. Berkurangnya jenis ikan tertentu tertentu akibat rusaknya terumbu karang sebagai tempat berkembangbiaknya biota laut termasuk beberapa jenis ikan yang selama ini banyak ditangkap dan dikonsumsi oleh penduduk Pulau Badi.

Masih ada dan terjadi kebiasaan serta pemahaman masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sehingga limbah rumah tangga seperti MCK dan sampah baik organik maupun anorganik langsung dibuang ke laut. Rumah penduduk khususnya yang berada di pinggir laut (pantai) masih ada yang membelakangi laut sehingga kecenderungannya mereka menganggap bahwa laut yang di belakang rumah adalah tempat pembuangan.

Masih banyak warga/penduduk yang belum memahami pentingnya terumbu karang sebagai tempat berkembangbiaknya ikan dan biota laut lainnya. Ancaman terhadap terumbu karang adalah Pengambilan terumbu karang untuk kebutuhan tertentu. Penangkapan dengan menggunakan potasium atau bus (*illegal fishing*). Menjadi tempat melempar jangkar karena keterbatasan tempat tambatan perahu.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perlindungan terumbu karang dan biota laut yaitu melalui dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pangkep bekerja sama dengan pihak kepolisian telah berusaha melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap yang melanggar aturan pengelolaan daerah atau wilayah perairan laut termasuk *illegal fishing* dan telah memberikan dampak terhadap hasil tangkap nelayan yang semakin membaik. Permasalahannya adalah apakah kondisi tersebut dapat berkelanjutan pada masa-masa yang akan datang sehingga dari waktu ke waktu kehidupan nelayan dapat semakin baik. Masih ada perilaku masyarakat nelayan yang tidak peduli terhadap rusaknya

terumbu karang, yang berpikir dan bertindak jangka pendek.

Pada prinsipnya sebagian masyarakat telah memahami tentang pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan karena sangat terkait dengan keberlangsungan kehidupan khususnya para nelayan. Pembelajaran tentang lingkungan terhadap anak-anak belum banyak dilakukan kecuali yang telah dilakukan oleh kelompok LSM seperti *eco natural* itupun belum fokus pada pendidikan lingkungan.

Terkait dengan pendidikan adalah masalah guru selain jumlahnya yang sangat terbatas, guru yang ada juga tidak secara rutin (tiap hari) melakukan proses pembelajaran baik di tingkat sekolah dasar (SD) maupun di tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Kondisi tersebut kecenderungan berpengaruh pada tingkat kualitas pendidikan anak karena secara kasuistik ada anak-anak yang telah duduk di kelas V SD tapi belum tau baca tulis dan ironisnya lagi bahwa orang tua juga cenderung apatis dengan kondisi tersebut artinya para orang tua hanya mengandalkan pendidikan formal yang ada tanpa proaktif untuk melakukan pembelajaran di rumah (*home schooling*)

Sarana Pendidikan meliputi dua SD yaitu SD 9 dan SD 27 serta satu SLTP. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi secara fisik bahwa bangunan sekolah yang ada cukup memadai untuk dapat dijadikan sebagai suatu tempat

berlangsungnya proses pembelajaran seperti ketersediaan papan tulis (*white board*) dan alat tulisnya serta bangku dan meja belajarnya.



**Gambar 7.** Fasilitas Pendidikan SD

Peranan dan dukungan orang tua terhadap pendidikan, secara moril bahwa umumnya orang tua mengharapkan anaknya dapat menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita anaknya, bahkan ada rasa beresalah jika anaknya putus sekolah atau tidak lanjut ke jenjang

pendidikan berikutnya. Namun harapan tersebut tidak sinkron dengan kondisi yang terjadi bahwa banyak anak-anaknya hanya menyelesaikan pendidikan formalnya sampai jenjang SD ataupun SLTP, selain faktor ekonomi juga faktor geografis yang menjadi salah satu faktor penghambat lanjutnya pendidikan anak bahwa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi harus meninggalkan pulau, sementara ada pekerjaan tertentu orang tua yang membutuhkan tenaga anak-anaknya

# 5

## KONDISI RUMAH TANGGA

### Sosial Ekonomi

**B**agi komunitas Pulau Badi membantu ekonomi keluarga dan rumah tangga, bagi seorang ibu rumah tangga yang bekerja dianggap tidak ada masalah selama pekerjaan itu tidak mengganggu tugas utama dalam rumah tangga. Apalagi kalau pekerjaan tersebut dilakukan dalam wilayah pulau atau tanpa harus meninggalkan keluarga. Untuk perempuan/ibu-ibu di pulau ini umumnya mau bekerja akan

tetapi kesempatan dan peluang itu tidak ada. Umumnya perempuan/ibu yang ada di pulau ini pendidikannya cukup rendah. Oleh karena itu salah satu yang dapat dilakukan adalah membuka usaha sendiri seperti jualan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat pulau

Pada dasarnya perempuan/ibu-ibu yang ada di Pulau Badi cukup senang dan siap menerima ketika ada pihak yang memberikan kegiatan pelatihan keterampilan. Cuma masalahnya bahwa kegiatan pelatihan apa yang dibutuhkan ibu-ibu atau perempuan di sini, kecuali kalau pelatihan yang terkait dengan proses produksi perikanan itupun tidak terlalu prospek karena umumnya disini hanya nelayan kecil (pemancing) yang hasil tangkapannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk melunasi utang-utang yang telah diambil sebelumnya di *pongawa* atau bos pemilik modal.

## **Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan.

Komunitas Pulau Badi memiliki potensi sumber daya utama dalam kelangsungan hidupnya yaitu laut. Potensi laut

bagi komunitas Pulau Badi secara ekonomi dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian utama yakni sebagai nelayan. Secara sosial menjadi sarana dalam melakukan hubungan dan interaksi dengan sesama.

Secara fisik lingkungan laut menjadi sarana transportasi dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan komunitas di luar pulau. Secara budaya laut menjadi wadah dalam pembentukan dan pengembangan budaya termasuk karakter dan sikap komunitas. Laut dan pulau berkontribusi dalam membentuk perilaku komunitas yang menjadikan berbeda dengan komunitas daratan. Sikap dan perilaku warga komunitas kepulauan dan daratan berbeda dalam merespons suatu fenomena, karena latarbelakang lingkungan fisik yang berbeda.

Akses terhadap sumber daya laut setiap warga komunitas memiliki peluang dan kesempatan yang sama, walaupun tidak semua warga komunitas memiliki kemampuan dan kapasitas yang sama, sehingga manfaat dari akses sumber daya laut juga berbeda. Kemampuan dan kapasitas yang berbeda dalam mengakses sumber daya laut menyebabkan perbedaan dalam kehidupan sosial ekonomi komunitas. Untuk itu bagi mereka yang memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengakses sumber daya laut diperlukan adanya intervensi dan dukungan pemberdayaan agar kesamaan hak dalam akses sumber daya laut, juga terjadi kesamaan dalam kehidupan ekonomi.

Sumber daya lain berupa sarana dan prasarana publik yang tersedia juga turut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan warga komunitas pulau Badi. Sumber daya tersebut seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, listrik, transportasi dan sarana ibadah. Ketersediaan sumber daya berupa sarana dan prasarana publik tersebut belum sepenuhnya maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan warga komunitas. Berbagai keterbatasan seperti keterbatasan dan komitmen guru, keterbatasan tenaga medis dan obat-obatan, aliran listrik belum aktif 24 jam, sarana transportasi tidak selalu siap setiap waktu dan lain-lain.

Selanjutnya sumber daya berupa organisasi dan kelompok semestinya juga dapat memfasilitasi warga komunitas, namun sebagian besar sumber daya tersebut tidak aktif dan tidak mempunyai program dan kegiatan. Kecuali kelompok nelayan yang aktif tetapi lebih bersifat internal sifatnya, karena hanya terbatas pada anggotanya yang memiliki hubungan berdasarkan profesi sebagai nelayan.

## **Perilaku dan Sikap**

Perilaku adalah suatu tindakan, aktivitas dan respons terhadap situasi tertentu, yang dipengaruhi oleh institusi dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu komunitas. Perilaku individu dan kolektif tidak berdiri sendiri melainkan suatu bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk merespons situasi tertentu.

Perilaku warga komunitas Pulau Badi sangat ditentukan oleh nilai, norma dan kebiasaan yang selama ini sudah menjadi pegangan bagi setiap individu untuk melakukan suatu tindakan dan perbuatan. Sikap dan perilaku warga komunitas Pulau Badi sangat dipengaruhi oleh nilai tradisi khususnya nilai ajaran agama Islam.

Selanjutnya perilaku anggota rumah tangga yang meliputi perilaku sehat, ekonomi dan lingkungan. Perilaku sehat nampak dalam aktivitas dan perbuatan seperti mandi, buang air besar, cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Perilaku anggota rumah tangga dalam menjaga dan memelihara kesehatan belum menggambarkan sebagai bentuk perilaku yang sehat, karena perilaku seperti cuci tangan, mandi dan buang air besar belum terpola dan bersistem.

Perilaku ekonomi rumah tangga masih berfokus dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan mengandalkan *bos/pongawa* sebagai tempat mendapat bantuan pinjaman. Sedangkan perilaku terhadap pemeliharaan kebersihan lingkungan masih berorientasi pada rumah tangga masing-masing, belum ada upaya dan tindakan yang terencana untuk melihat kebersihan lingkungan sebagai masalah bersama.



# 6

## KEDEKATAN MARS DAN KOMUNITAS PULAU BADI

### **Kontribusi PT. Mars Sybiocionce Bagi Komunitas**

**P**T. Mars Symbioscience Indonesia telah melakukan rehabilitasi terumbu karang di daerah perlindungan laut seluas 700 meter persegi dalam wilayah perairan Pulau Badi, program ini telah dirancang sejak tahun 2007. Rehabilitasi dilakukan dengan menggunakan struktur laba-laba yang terbuat dari besi cor tujuh milimeter yang dilapisi dengan

obat anti karat, resin, serta dilapisi dengan pasir. Besi dilas dengan bentuk heksagonal, enam kaki menyerupai laba-laba dengan tinggi 40 cm (Berita Antara, 2014).

Program lain yang telah dilakukan adalah budi daya kuda laut dan ikan kerapu tikus serta beberapa jenis ikan lainnya sebagai salah satu bentuk penciptaan alternatif kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayuran dengan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar pulau seperti dari Makassar, telah dilakukan pula program penanaman sayuran dengan sistem teknologi tepat guna tanpa menggunakan tanah (hidroponik). Program ini melibatkan kaum perempuan dengan sistem pembelajaran dan pengelolaan secara berkelompok.

Sebagian besar kelompok masyarakat menganggap bahwa beberapa program telah dilakukan oleh PT. Mars memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat langsung yang dirasakan warga masyarakat misalnya pada saat mereka dilibatkan dalam proses pengikatan dan penanaman terumbu karang dengan sistem kerangka laba-laba. Setiap warga yang dipekerjakan mendapatkan upah sesuai dengan volume kerja yang dilakukan. Meskipun secara insidental akan tetapi kegiatan seperti ini dianggap peluang kerja yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan ekonomi rumah tangga. Pada sisi yang lain bahwa kegiatan ini juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat akan pentingnya memelihara lingkungan termasuk terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan serta biota laut lainnya.

Seiring dengan makin membaiknya terumbu karang yang telah direhabilitasi, masyarakat telah merasakan secara langsung manfaatnya dengan semakin banyaknya populasi ikan-ikan tertentu yang tumbuh dan berkembang di sekitar pulau mereka. Nelayan pemancing kadang tidak perlu terlalu jauh lagi meninggalkan pulau mereka, untuk menangkap jenis ikan tertentu demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **Model Intervensi Pengembangan Komunitas PT. MARS**

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi coklat olahan maka PT. Mars Symbioscience Indonesia senantiasa melakukan berbagai macam kegiatan baik yang berkaitan langsung dengan proses produksi maupun kegiatan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus diberikan kepada masyarakat.

Beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Badi merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas serta peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengembangan kapasitas dilakukan melalui *learning center* dan konservasi sedangkan peningkatan pendapatan dilakukan melalui budi daya dan pemberian keterampilan.

Implementasi program dilakukan melalui sosialisasi individu dan kelompok dengan cara diskusi maupun rapat atau pertemuan. Strategi intervensi yang diawali dengan melaku-

kan sosialisasi mendapat tanggapan dari beberapa kelompok masyarakat

Umumnya kelompok masyarakat mengetahui bahwa sebelum implementasi program, pihak perusahaan telah melakukan konsultasi dan sosialisasi baik secara individu maupun kelompok. Konsultasi dan sosialisasi yang telah dilakukan cenderung kurang maksimal karena hanya melibatkan orang atau kelompok tertentu. Sehingga sebagian dari kelompok masyarakat tersebut, ada yang tidak mengetahui nama terlebih lagi kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Kurang maksimalnya konsultasi dan sosialisasi mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perusahaan. Hal tersebut cenderung memicu timbulnya saling curiga antara sesama warga terutama terhadap mereka yang terlibat langsung dalam program, bahkan berpotensi juga menimbulkan rasa curiga masyarakat terhadap perusahaan. Anggapan yang berkembang di beberapa kelompok masyarakat bahwa seluruh kegiatan atau program perusahaan yang dilaksanakan diperuntukkan untuk seluruh warga Pulau Badi, sehingga keuntungan yang didapatkan khususnya dari kegiatan atau usaha produksi seharusnya dilakukan bagi hasil ke warga yang lain.

Mendorong partisipasi warga serta menghilangkan rasa curiga dan prasangka buruk antara sesama warga maupun terhadap perusahaan sangat tergantung dari efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Hasil akhir dari kegiatan

sosialisasi yang diharapkan adalah terwujudnya saling percaya diantara semua komponen program (masyarakat, pemerintah dan perusahaan) sebagai modal utama untuk keberlanjutan program yang dilakukan.

## **Respons Komunitas Terhadap PT. MARS**

Respons ataupun dukungan warga seiring dengan manfaat yang telah dirasakan oleh sebagian warga dari beberapa program yang dilaksanakan khususnya yang terkait dengan perbaikan lingkungan maupun penciptaan alternatif kegiatan ekonomi warga. Ada beberapa alasan warga melalui kelompok-kelompok yang ada sehingga mereka mendukung keberadaan perusahaan dengan beberapa kegiatannya, seperti yang terlihat pada table 4 berikut :

**Tabel 5.1.** Dukungan Keberadaan PT. Mars Symbioscience Indonesia Menurut Kelompok Masyarakat

<b>Kelompok Masyarakat</b>	<b>Dukungan Terhadap Keberadaan Organisasi dan Kegiatannya</b>
Kelompok Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung, karena ada manfaat dari apa yang mereka lakukan.</li> <li>- Ya, mendukung</li> <li>- Tidak mendukung, karena melarang membuang jangkar, semua yang dia kerja kami tidak dukung, karena lama kelamaan pulau kami akan di jual.</li> <li>- Ada tapi pilih-pilih</li> <li>- Mendukung</li> <li>- Mendukung, karena kepentingan bersama yang lebih baik.</li> <li>- Mendukung, karena membantu mengembangkan terumbu karang</li> </ul>

Kelompok Masyarakat	Dukungan Terhadap Keberadaan Organisasi dan Kegiatannya
Kelompok Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokoh masyarakat mendukung penuh kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, mengembangkan potensi yang telah ada.</li> <li>- Tidak tau.</li> <li>- Sebagian mendukung, sebagian tidak</li> <li>- Mendukung programnya yg membantu masyarakat dipulau badi.</li> <li>- Iya, Kami mendukung karena berusaha memajukan perekonomian pulau badi</li> <li>- Mendukung .</li> <li>- Terserah mereka mau melakukan apa, yang penting tidak merugikan.</li> <li>- Mendukung, tapi ada yang merasa terganggu dengan adanya terumbu karang.</li> </ul>
Kelompok Tokoh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.</li> <li>- Selama menguntungkan kita semua pasti kita dukung</li> </ul>
Kelompok Sawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung terutama yang terkait dengan terumbu karang</li> <li>- Kalau bisa diperluas wilayahnya</li> </ul>
Kelompok Ekonomi Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung</li> <li>- Mendukung karena membantu masyarakat dan memperbaiki pulau kita.</li> <li>- Kami mendukung karena berusaha memajukan perekonomian pulau badi</li> </ul>

Sumber: Data Primer PGD dan Wawancara Mendalam Tahun 2015

Meskipun masih ada yang pro dan kontra terhadap keberadaan perusahaan dengan beberapa programnya, tapi sebagian besar kelompok masyarakat menaruh harapan terhadap peran-peran perusahaan baik keberlanjutan program

yang ada sekarang maupun rencana program baru berikutnya. Program-program yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan lebih mendorong percepatan perbaikan kondisi kehidupan sosial warga maupun lingkungan fisik pulau.

## **Komitmen Terhadap Pengembangan Masyarakat Pulau**

Komitmen perusahaan dapat dilihat dari program yang dilakukan selama ini serta rencana pengembangan program yang sudah ada maupun penambahan program yang baru. Program rehabilitasi karang yang dilakukan sejak tahun 2013 telah dilakukan penanaman sekira 10.000 struktur laba-laba dan area konservasi senantiasa akan dikembangkan berdasarkan kondisi karang yang ada, seiring dengan pemeliharaan struktur laba-laba yang telah ditanam. Demikian pula dengan program budi daya kuda laut dan ikan kerapu serta jenis ikan lainnya maupun program hidroponik akan terus dikembangkan dan tetap memotivasi warga untuk proaktif dalam program tersebut.

Untuk pengembangan ataupun program yang baru, pihak perusahaan telah membentuk tim untuk melakukan *assessment* dan pemetaan potensi sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan. Tim yang dibentuk melibatkan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil *assessment* dan pemetaan diharapkan menghasilkan rumusan dan rekomendasi terkait dengan kondisi rumah tangga, potensi asset serta

modal sosial yang ada, sebagai dasar untuk pengembangan ataupun pelaksanaan program yang baru. Rencana intervensi kedepan akan lebih menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada keterlibatan masyarakat secara partisipatif mulai dari tahapan sosialisasi sampai pada pelaksanaan maupun evaluasi dan *monitoring* program.

# 7

## **MEMBANGUN HUBUNGAN DAN KEPEMILIKAN BERSAMA KOMUNITAS**

**P**erusahaan yang bergerak dalam bentuk produksi makanan coklat bernama PT. Mars Symbioscience Indonesia berlokasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Pada saat ini warga komunitas Pulau Badi belum memahami secara detail perusahaan tersebut, khususnya kegiatan-kegiatan dan cakupan produksi yang dilakukan. Pemahaman warga yang sangat terbatas tentang perusahaan Mars tersebut

karena keterbatasan sarana dan sumber informasi yang ada selama ini. Sumber informasi bagi warga komunitas terkait dengan perusahaan PT. Mars adalah selain dari tetangga, kerabat/teman, warga Pulau Badi mengetahui nama perusahaan dari kelompok/LSM (ekonatural) dan orang atau kelompok-kelompok tertentu yang merupakan kontak person pada awal mula perusahaan memulai aktivitasnya di Pulau ini.

Keberadaan PT. Mars Symbioscience Indonesia yang melakukan beberapa program dan kegiatan di Pulau Badi merupakan awal mula proses terbentuknya interaksi. Hubungan dan interaksi yang terbangun tersebut belum merepresentasikan seluruh warga komunitas, tetapi hanya beberapa person dan kelompok tertentu saja. Kesan awal yang ditimbulkan sebagai bentuk hubungan warga komunitas dengan PT. Mars adalah adanya kecurigaan, isu negatif, prasangka serta pro dan kontra.

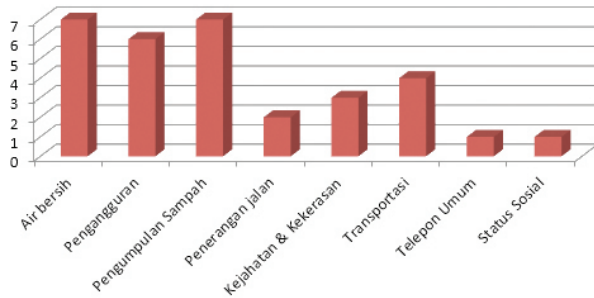
Program yang telah atau sementara berjalan belum dirasakan manfaatnya oleh komunitas bahkan masih beranggapan bahwa apa dilakukan oleh pihak perusahaan itu demi untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri dan secara ekstrem ada yang beranggapan bahwa Pulau Badi ini suatu waktu akan dikuasai oleh perusahaan dan menjadi miliknya Komunitas menganggap bahwa Mars hanya melakukan program terhadap orang atau kelompok-kelompok tertentu. Kesesuaian program dengan kebutuhan komunitas belum menyentuh langsung terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Mars ada-

lah rehabilitasi terumbu karang, percontohan tanaman sayur hidroponik, pembudidayaan kuda laut dan beberapa jenis ikan tertentu serta kegiatan pendidikan dan pembangunan *learning center*.

Komunitas Pulau Badi memandang bahwa program yang telah dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya kaum ibu-ibu rumah tangga. Selain program jangka panjang seperti yang ada sekarang (terumbu karang) harusnya ada juga program jangka pendek (pemberian keterampilan, modal usaha, dll).

PT. Mars sebagai salah satu perusahaan asing memiliki visi, misi dan komitmen terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan tersebut memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang mengalami banyak permasalahan. Pada intinya perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab sosial untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemetaan bahwa terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh komunitas Pulau Badi. Beberapa masalah yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut.



**Gambar 8.** Masalah Komunitas Pulau Badi Berdasarkan Rangking

Pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pangkep juga belum secara terpadu melakukan kegiatan atau program bersama dengan perusahaan. Pemerintah daerah masih sebatas seremonial terhadap kegiatan atau program yang telah dilakukan oleh perusahaan (Mars) kecuali pihak kepolisian yang telah proaktif melakukan proteksi terhadap program konservasi terumbu karang telah dilakukan oleh perusahaan bersama dengan masyarakat

Program dan kegiatan yang telah dan sedang berjalan di Pulau Badi merupakan media yang strategis dalam membangun hubungan dan kerja sama antara Mars dengan komunitas pulau. Bahkan program dan kegiatan tersebut dapat menjadi sarana dalam membangun hubungan dan kepemilikan bersama warga komunitas dengan perusahaan Mars.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal mengenai dukungan dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan program yaitu Perusahaan (Mars) sangat kurang melakukan

sosialisasi massal sehingga masyarakat pada awalnya kurang memberikan dukungan keberadaan perusahaan (Mars) di Pulau Badi bahkan yang muncul hanya kecurigaan dan anggapan negatif yang menganggap orang luar (*out sider*) yang akan menguasai pulau ini. Salah satu tuntutanannya adalah pelibatan masyarakat secara maksimal jangan hanya pada kelompok atau pihak tertentu yang selama ini telah terlibat dalam kegiatan/program yang telah dilakukan.



# 8 PENUTUP

**B**erdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, setidaknya buku ini memuat enam permasalahan inti, yang dapat dirangkum dalam kesimpulan berikut ini.

Pertama: Komunitas Pulau Badi memiliki potensi aset yang cukup lengkap dan memadai, namun sejumlah aset yang tersedia tersebut tidak mampu dikelola secara maksimal sehingga potensi tersebut belum mampu berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan warga komunitas secara keseluruhan.

Kedua: Enam elemen modal sosial yang dijadikan ukuran dalam mengukur potensi modal sosial komunitas Pulau Badi, Namun hanya tiga elemen saja yang dapat dijadikan modal dasar warga komunitas yakni inklusi dan kohesivitas, kepercayaan dan solidaritas dan aksi kolektif dan kerja sama, sementara tiga elemen lainnya seperti informasi dan komunikasi, kelompok dan jaringan serta pemberdayaan dan tindakan politik masih lemah sebagai modal dasar. Potensi modal sosial untuk dijadikan modal dasar bagi komunitas Pulau Badi hanya bersifat merekatkan (*bounding social capital*) Sementara potensi modal sosial sebagai modal dasar untuk membangun hubungan dan kerja sama dengan pihak luar komunitas (*bridging social capital*) masih lemah.

Ketiga: Secara umum kondisi sosial komunitas Pulau Badi cukup baik, walaupun terjadi penyimpangan sosial sifatnya tidak sampai menimbulkan keresahan sosial, karena dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang ada. Sementara kondisi lingkungan sudah terjadi penurunan kualitas dalam beberapa tahun terakhir seperti tingkat kepadatan pemukiman, sistem drainase tidak jelas, kebersihan lingkungan dan abrasi pantai, kecuali terumbu karang yang sedang mengalami rehabilitasi dan perbaikan yang selama ini dilakukan oleh PT. Mars.

Keempat: Kondisi rumah tangga komunitas pulau Badi mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam memenuhi kebutuhannya seperti aspek pendidikan yang ditandai dengan tingginya angka putus sekolah dan kualitas pendidik-

an yang ditandai dengan rendahnya kehadiran guru dalam mengajar di sekolah, aspek kesehatan ditandai dengan keterbatasan obat dan tenaga dokter, aspek ekonomi ditandai dengan keterbatasan dalam diversifikasi sumber mata pencaharian, rendahnya keterampilan dan tingginya angka pengangguran serta terbatasnya sarana air bersih/minum.

Kelima: Umumnya warga komunitas Pulau Badi mendukung keberadaan PT. Mars Symbioscience Indonesia selama program-program yang dilakukan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun lingkungan dan walaupun ada sebagian kecil warga komunitas yang selama ini berbeda pendapat bukan berarti menolak tetapi karena pemahaman yang tidak tuntas.

Keenam: Membangun hubungan kepemilikan bersama komunitas berpotensi untuk dilakukan oleh karena kedua belah pihak memiliki kebutuhan dan kepentingan bersama (symbiosiosis mutualisme), namun setiap program dan kegiatan pelaksanaan ataupun pengembangan program harus melibatkan warga dan tokoh-tokoh masyarakat secara maksimal yang dimulai dari tingkat RT sampai tingkat Desa



## DAFTAR PUSTAKA

- Grootaert, C. 1998. Social Capital: The Missing Link? Social Capital Initiative. *Working Paper*. No.3. World Bank.
- Hasbullah J, 2006, *sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)* MR-United Press Jakarta.
- Ibrahim, L. D. 2006. Memanfaatkan Modal sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi. *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol.1.No. 2.
- Ife J. & Tesoriero F., 2008, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Community Development, Pustaka Pelajar
- Kusnadi, 2003, *Akar Kemiskinan Nelayan*, LKiS Yogyakarta

Lawang R, M,Z, 2004, *Kapital sosial Dalam Perspektif Sosiologik (suatu Pengantar)* Fisip UI Press Jakarta,.

Munandar, S, 2002, *Pemberdayaan Modal Sosial Sebagai Alternatif Antisipasi Konflik sosial (Makalah)*. Seminar Nasional ISI di Bogor Jawa Barat.

Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Mattiro Deceng 2012-2016



Suparman Abdullah, lahir di Bone, 15 Juli 1968. Pernah bersekolah di SD Negeri 1 Watampone dan lulus di tahun 1981. Melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 9 Makassar dan lulus di tahun 1984. Hingga melanjutkan sekolah di SMA Negeri 6 Makassar, dan lulus di tahun 1993.

Masuk di Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin pada tahun 1993. Pendidikan S2 di Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003. Lanjut program S3 Sosiologi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2014. Saat ini tercatat sebagai Dosen di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sejak 1994.

Aktif diberbagai organisasi serta telah mengikuti berbagai macam pelatihan dan seminar. Penulis juga aktif menuliskan jurnal dan artikel yang telah di publikasikan, baik secara nasional maupun internasional.



Kampus Unhas Tamalanrea,  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon: 0411 – 8997706 HP/WA 085353555569  
Email: unhaspress@gmail.com

ISBN 978-979-530-259-9

